



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

**LAPORAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN** **TAHUN**
2021



Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 3, Km. 5, Kota Serang - Banten 42123
Tel/Fax. (0254) 214085 – 214855 | web: <http://www.ptun-serang.go.id> | e-mail : serang@ptun.org

KATA PENGANTAR

Pertama-tama perkenankanlah kami memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2021.

Penyusunan Laporan ini didasarkan pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 3111/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021, yang pada intinya berisi Program Kerja dan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam kurun waktu satu tahun.

Dengan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 ini diharapkan mampu merepresentasikan wajah birokrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menjadi birokrasi bersih dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Dengan kata lain, ini adalah merupakan pekerjaan besar bagi jajaran Peradilan Tata Usaha Negara untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang telah ditetapkan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2021 ini merupakan laporan atas pelaksanaan kegiatan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selama kurun waktu 2021 yang semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat pencari keadilan, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang optimal, baik berupa *output* maupun *outcome* dan juga sebagai bentuk dari pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sudah ditetapkan yaitu: "Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang Agung"

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami menerima dan menghargai kritik dan saran konstruktif guna menyempurnakan Laporan Kegiatan di masa yang akan datang.

Serang, 10 Januari 2022
KETUA,

HERRY WIBAWA, S.H., M.H.
NIP. 195708051982031006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Kebijakan Umum Peradilan	1
B. Visi dan Misi	2
C. Rencana Strategis	3
BAB II A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	6
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	14
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	16
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	18
B. PENYELESAIAN PERKARA	
1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	19
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	19
3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding ...	21
4. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	21
5. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)	21
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)	
1. Pos Bantuan Hukum	22
2. Prodeo	23
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	
A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan	26
B. Mutasi	27
C. Promosi.....	27
D. Pensiun	28
E. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat	29

BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	
	A. Pengelolaan Keuangan	36
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	39
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	43
BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	
	A. Akreditasi Penjaminan Mutu	48
	B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49
	C. Inovasi Pelayanan Publik	53
	D. Kegiatan Layanan Lainnya	60
BAB VI	PENGAWASAN	
	A. Internal	64
	B. Evaluasi	66
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	67
	B. Rekomendasi	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	7
Tabel 2.2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	14
Tabel 2.3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	16
Tabel 2.4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	18
Tabel 2.5. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2021	19
Tabel 2.6. Penyelesaian Perkara Tahun 2021	20
Tabel 3.1. Komposisi SDM Pengadilan TUN Serang	26
Tabel 3.2. Rekapitulasi Mutasi Hakim dan Pegawai PTUN Serang	27
Tabel 3.3. Rekapitulasi Promosi Hakim dan Pegawai PTUN Serang	27
Tabel 3.4. Rekapitulasi Pensiun Hakim dan Pegawai PTUN Serang	28
Tabel 3.5. Monitoring Diklat/Bimtek Hakim dan Pegawai PTUN Serang	30
Tabel 4.1. Realisasi Belanja Pegawai	37
Tabel 4.2. Realisasi Belanja Barang Operasional	37
Tabel 4.3. Realisasi Belanja Modal	38
Tabel 4.4. Realisasi Belanja Barang Operasional Kepaniteraan	39
Tabel 4.5. Keadaan Sarana dan Prasarana Tanah dan Gedung	39
Tabel 4.6. Keadaan Sarana dan Prasarana Rumah Negara	39
Tabel 4.7. Keadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Roda 2	40
Tabel 4.8. Keadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Roda 4	40
Tabel 4.9. Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40
Tabel 4.10. Penambahan/Hibah Sarana dan Prasarana Gedung.....	41
Tabel 4.11. Kegiatan Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung	41
Tabel 4.12. Keadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung	42
Tabel 4.13. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung	42
Tabel 4.14. Kegiatan Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung	43
Tabel 4.15. Keadaan Perangkat Teknologi Informasi	44
Tabel 4.16. Jumlah Perkara Terdaftar Melalui E-Court	45
Tabel 4.17. Alamat SIPP Web Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	46
Tabel 5.1. Jumlah Permohonan Layanan PTSP Tahun 2021	51
Tabel 6.1. Daftar Nama Hakim Pengawas Bidang Tahun 2021	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Grafik Penyerapan Anggaran posbakum T.A. 2021	22
Gambar 2.2. Grafik Penyerapan Anggaran Prodeo T.A. 2021	24
Gambar 4.1. Grafik Realisasi Belanja Pegawai	37
Gambar 4.2. Grafik Realisasi Belanja Barang	38
Gambar 4.3. Grafik Realisasi Belanja Modal	38
Gambar 4.4. Server Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	44
Gambar 4.5. E-Court Corner	45
Gambar 4.6. Mesin Informasi E-Court	45
Gambar 4.7. Mesin Antrian Sidang	46
Gambar 4.8. Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP PTUN Serang	47
Gambar 5.1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu “A” Excellent	49
Gambar 5.2. Meja PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	50
Gambar 5.3. Mesin Nomor Antrian Pengunjung	50
Gambar 5.4. Tampak Muka Aplikasi PTSP Online	52
Gambar 5.5. Layanan Voice Call PTSP Online	52
Gambar 5.6. Layanan Video Call PTSP Online	53
Gambar 5.7. Layanan Online Chat PTSP Online	53
Gambar 5.8. Aplikasi Asisten Digital Jawara	54
Gambar 5.9. Aplikasi Inovasi Akses Layanan Touchless	55
Gambar 5.10. Tampak Muka Aplikasi (SIMKARA)	55
Gambar 5.11. Tampak Muka Aplikasi (SIMPATI)	56
Gambar 5.12. Tampak Muka Aplikasi (EMPATI)	56
Gambar 5.13. Tampak Muka Aplikasi (SIMISTI)	57
Gambar 5.14. Modul User Aplikasi (SIDAPAT).....	57
Gambar 5.15. Menu Login Aplikasi (SIMARJAN)	58
Gambar 5.16. Tampak Aplikasi PTSP Online (SEMPURNA).....	58
Gambar 5.17. Tampak Muka Aplikasi Tata Persuratan PTUN Serang	59
Gambar 5.18. Maklumat Pelayanan Pada Aplikasi PPID PTUN Serang	59
Gambar 5.19. Sertifikat Zona Integritasi (WBBM).....	60
Gambar 5.20. Sertifikat Penganugerahan Sebagai Badan Publik Informatif	62

Gambar 5.21. Sertifikat Penghargaan Terbaik III Evaluasi dan Implementasi SIPP Oleh Ditjen Badilmiltun	62
Gambar 5.22. Sertifikat Penghargaan Terbaik Ke III Pengadilan Tk Pertama Penilaian Website Oleh Ditjen Badilmiltun	63
Gambar 5.23. Champion Meeting 2020-2021 Untuk Pengadilan Tk. Pertama Terbanyak Meraih Peringkat Terbaik Pelatihan Pusklat Menpim MA	63

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Laporan adalah sebuah produk informasi yang sangat penting karena berkaitan dengan kondisi badan publik, keandalan dari informasi yang terkandung sangatlah dibutuhkan bagi pihak yang mempunyai kepentingan terhadap badan publik. Oleh karenanya badan publik diharapkan lebih transparan dalam mengungkapkan informasi mengenai *corporate governance*, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan oleh Stakeholder karena pengungkapan sebagai salah satu aspek *good governance* diharapkan dapat menjadi dasar untuk melihat baik tidaknya kinerja satu badan publik.

Pengungkapan informasi secara terbuka mengenai satuan kerja sangatlah penting bagi badan publik. Hal ini dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen badan publik kepada stakeholder. Keterbukaan informasi dari satu badan publik dapat digunakan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen badan publik kepada stakeholder. Keterbukaan informasi dari badan publik dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi stakeholder dalam pengambilan kebijakan.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Tingkat Pertama, kegiatan yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.

B. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Sebagaimana halnya Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan lembaga peradilan tertinggi dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam struktur organisasi berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki Visi dan Misi yang sama dengan organisasi induknya, yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG YANG AGUNG”

Misi : Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk memperjelas upaya pencapaian keberhasilan visi tersebut, telah dirumuskan 4 misi sebagai fokus program kerjanya:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

C. Rencana Strategis

Perencanaan strategis dapat diartikan sebagai suatu pengarahan serta pemikiran untuk mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengacu pada Rencana Strategis 2020 – 2024 Mahkamah Agung RI, dan setiap tahun telah dilakukan Reviu oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui kebijakan yang dibuat oleh unsur pimpinan (Ketua / Hakim / Panitera dan Sekretaris beserta jajarannya). Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menyusun rencana strategis. Dalam melaksanakan Rencana Strategis tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang membuat langkah – langkah strategis sebagai berikut:

1. Merencanakan dan menyusun Program Kerja.
Program Kerja pada dasarnya meliputi tugas pokok dan fungsi.
2. Merencanakan dan menyusun Pembagian Tugas (*Job Description*) yaitu membagi tugas pokok organisasi ke seluruh Sub Bagian dan staf untuk mewujudkan pelaksanaan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas.
3. Merencanakan dan menerbitkan suatu keputusan dengan menunjuk masing-masing hakim menjadi Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) sebagai tindak lanjut Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/080/SK/VII/2006 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan*.
4. Penyelesaian perkara maksimal dalam waktu 6 bulan.
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan mengikutsertakan pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, lembaga lain maupun di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sendiri yang dilaksanakan secara rutin melalui rapat pembinaan sebulan sekali dan rapat terbatas sesuai kebutuhan oleh Ketua, Panitera dan Sekretaris.
6. Melakukan pembaruan sistem Peradilan yang berwibawa, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana cetak biru (*blue print*) yang dibuat Mahkamah Agung.

7. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi di era globalisasi dan digitalisasi ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memiliki website menggunakan situs berdomain *go.id* dengan Home Page: *www.ptun-serang.go.id*, Selain sebagai bentuk tindaklanjut pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia, juga sebagai bentuk pelaksanaan amanat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan serta Surat Edaran Dirjen Badilmiltun No. 03/DjMT/SE/X/2012 tentang Informasi Yang Wajib Ditampilkan pada Website serta SIPP PTUN di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta membantu kelancaran tugas sehingga Asas Peradilan Beracara Cepat, Sederhana, Biaya Ringan dan Berkeadilan dapat terapkan. Sesuai Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: W2-TUN7/1249/HM.02.3/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website dan Admin TI (Teknologi Informasi) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, maka telah dibentuk tim website Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang bertugas mengelola website guna memberikan pelayanan keterbukaan informasi dan sekaligus membantu kelancaran tugas peradilan dalam melaksanakan Asas Peradilan Beracara Cepat, Sederhana, Biaya Ringan dan Berkeadilan.
8. Dalam rangka memberikan pelayanan informasi tentang kelembagaan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kepada masyarakat luas melalui media, Ketua Pengadilan telah menunjuk petugas kehumasan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang bertugas untuk melakukan kegiatan komunikasi secara sistematis dalam membangun citra positif pengadilan.
9. Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran tahun berjalan.
10. Mengadakan inventarisasi jumlah data Pegawai (*bezetting*) yang disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan jumlah data pegawai (*bezetting*)

dan koreksi oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

11. Menyusun daftar Pegawai yang akan naik pangkat/golongan, kenaikan gaji berkala setiap tahun.
12. Menyusun Rencana Kerja Tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana gedung, sarana dan prasarana fasilitas gedung (pengadaan meubelair, AC, alat pengolah data/komputer, meja kerja, meja sidang, kursi kerja, kursi sidang majelis) dan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara.

Rencana strategis tersebut merupakan pemetaan masalah, diharapkan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas teknis yudisial maupun non yudisial dapat dilakukan dengan baik serta dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), sehingga hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan dapat diminimalisir. Terlebih lagi dengan dibentuknya Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) dapat memperkokoh pelaksanaan Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

BAB II

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2020 terdapat Sisa 25 (dua puluh lima) perkara, pada tahun 2021, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, menerima Perkara masuk 89 (delapan puluh sembilan) Perkara, Perkara yang dicabut 25 (dua puluh lima) Perkara, Perkara yang diputus 78 (tujuh puluh delapan) Perkara, Perkara yang didismissal 5 (lima) Perkara, Perkara Perlawanan 1 (satu) Perkara dan Sisa Perkara 20 (dua puluh) Perkara.

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2020 terdapat sisa 11 (sebelas) Perkara, pada tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerima Perkara masuk 39 (tiga puluh sembilan) Perkara, Perkara yang dicabut 1 (satu) Perkara, Perkara yang diputus 32 (tiga puluh dua) Perkara dan Sisa Perkara 17 (tujuh belas) Perkara.

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2020 terdapat Sisa 5 (lima) Perkara, pada tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerima Perkara masuk 49 (empat puluh sembilan) Perkara, Perkara yang dicabut tidak ada, Perkara yang diputus 28 (dua puluh delapan) Perkara, dan Sisa Perkara 26 (dua puluh enam) Perkara.

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2020 terdapat Sisa 5 (lima) Perkara, pada tahun 2021, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerima Perkara masuk 12 (dua belas), Perkara yang dicabut tidak ada, Perkara yang diputus 5 (lima) Perkara dan Sisa Perkara 12 (dua belas) Perkara.

Tabel 2.1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

NO	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	TANGGAL PENERIMAAN	TANGGAL PENETAPAN DISMISSAL	ACARA SINGKAT				ACARA BIASA / ACARA CEPAT				SISA AKHIR NOMOR PERKARA		KETERANGAN
					TANGGAL		TANGGAL		TANGGAL PENETAPAN MAJELIS HAKIM DAN PANITERA / PP	TANGGAL			BELUM DIBAGI	BELUM DIPUTUS	
					PERNERIMAAN PERLAWANAN	PENETAPAN MAJELIS HAKIM DAN PANITERA / PP	DIMULAINYA SIDANG	PUTUSAN PERLAWANAN		PEMERIKSAAN PERSIAPAN	DIMULAINYA SIDANG	PUTUSAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1/G/2021/PTUN.SRG	Pajak	07/01/2021	-	-	-	-	-	30/03/2021	08/04/2021	04/05/2021	02/10/2021	-	-	Dicabut
2	2/G/2021/PTUN.SRG	Pertanahan	12/01/2021						13/01/2021	20/01/2021	10/02/2021	11/05/2021			Dikabulkan
3	1/P/FP/2021/PTUN.SRG	Permohonan / Fiktif Positif	13/01/2021	-	-	-	-	-	13/01/2021	-	19/01/2021	09/02/2021	-	-	Tidak Diterima
4	3/G/2021/PTUN.SRG	Pertanahan	18/01/2021	-	-	-	-	-	12/01/2021	27/01/2021	04/03/2021	06/06/2021	-	-	Tidak Diterima
5	4/G/KI/2021/PTUN.SRG	KIP	-	-	-	-	-	-	19/01/2021	-	23/03/2021	13/04/2021	-	-	Ditolak
6	5/G/2021/PTUN.SRG	Pertanahan	05/02/2021	08/02/2021	-	-	-	-	08/02/2021	17/02/2021	24/03/2021	16/06/2021	-	-	Tidak Diterima
7	6/G/2021/PTUN.SRG	Lain-lain	11/02/2021	11/02/2021	-	-	-	-	11/02/2021	25/02/2021	25/03/2021	25/05/2021	-	-	Tidak Diterima
8	7/G/2021/PTUN.SRG	Lain-lain	15/02/2021	15/02/2021	-	-	-	-	15/02/2021	24/02/2021	25/03/2021	17/06/2021			Tidak Diterima

9	8/G/2021/PTUN.SRG	Pertanahan	16/02/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	01/03/2021	-	-	Dicabut
10	9/G/2021/PTUN.SRG	Pertanahan	23/02/2021	24/02/2021	-	-	-	-	24/02/2021	09/03/2021	07/04/2021	30/08/2021	-	-	Tidak Diterima
11	10/G/2021/PTUN.SRG	Pertanahan	04/03/2021	04/03/2021	-	-	-	-	04/03/2021	16/03/2021	13/04/2021	30/06/2021	-	-	Dikabulkan
12	11/G/2021/PTUN.SRG	Perijinan	08/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	16/03/2021	-	-	Dicabut
13	12/G/2021/PTUN.SRG	Lain-lain	10/03/2021	10/03/2021	-	-	-	-	10/03/2021	24/03/2021	21/04/2021	30/08/2021	-	-	Ditolak
14	13/G/2021/PTUN.SRG	Pertanahan	10/03/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	31/03/2021	-	-	Dicabut
15	14/G/TF/2021/PTUN.SRG	Lain-lain	17/03/2021	18/03/2021	-	-	-	-	18/03/2021	01/04/2021	18/05/2021	22/09/2021	-	-	Tidak Diterima
16	15/G/2021/PTUN.SRG	Lain-lain	17/03/2021	19/03/2021	-	-	-	-	19/03/2021	01/04/2021	06/05/2021	06/08/2021	-	-	Ditolak
17	16/G/2021/PTUN.SRG	Pertanahan	19/03/2021	30/03/2021	-	-	-	-	01/04/2021	08/04/2021	20/05/2021	16/09/2021	-	-	Dikabulkan
18	17/G/KI/2021/PTUN.SRG	KIP	01/04/2021	-	-	-	-	-	17/05/2021	-	03/06/2021	01/07/2021	-	-	Ditolak
19	18/G/KI/2021/PTUN.SRG	KIP	01/04/2021	-	-	-	-	-	17/05/2021	-	03/06/2021	01/07/2021	-	-	Ditolak
20	19/G/KI/2021/PTUN.SRG	KIP	01/04/2021	-	-	-	-	-	17/05/2021	-	03/06/2021	15/07/2021	-	-	Ditolak
21	20/G/KI/2021/PTUN.SRG	KIP	01/04/2021	-	-	-	-	-	17/05/2021	-	03/06/2021	15/07/2021	-	-	Ditolak
22	21/G/2021/PTUN.SRG	Lain-lain	05/04/2021	06/04/2021	-	-	-	-	06/04/2021	15/04/2021	06/05/2021	06/05/2021	-	-	Dicabut
23	22/G/2021/PTUN.SRG	Pertanahan	08/04/2021	08/04/2021	-	-	-	-	08/04/2021	08/04/2021	25/05/2021	08/09/2021	-	-	Dikabulkan

24	23/G/2021/PTUN.SRG	Pertanahan	14/04/2021	16/04/2021	-	-	-	-	16/04/2021	27/04/2021	02/06/2021	05/10/2021	-	-	Dicabut
25	24/G/2021/PTUN.SRG	Pertanahan	15/04/2021	19/04/2021	-	-	-	-	19/04/2021	29/04/2021	10/06/2021	19/08/2021	-	-	Dicabut
26	25/G/2021/PTUN.SRG	Pertanahan	16/04/2021	19/04/2021	-	-	-	-	19/04/2021	21/04/2021	10/06/2021	28/10/2021	-	-	Dikabulkan
27	26/G/2021/PTUN.SRG	Perijinan	20/04/2021	22/04/2021	-	-	-	-	22/04/2021	04/05/2021	03/06/2021	03/06/2021	-	-	Dicabut
28	27/G/2021/PTUN.SRG	Pertanahan	26/04/2021	26/04/2021	-	-	-	-	26/04/2021	05/05/2021	03/06/2021	14/09/2021	-	-	Tidak Diterima
29	28/G/KI/2021/PTUN.SRG	KIP	28/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	02/06/2021	-	-	Dicabut
30	29/G/KI/2021/PTUN.SRG	KIP	28/04/2021	-	-	-	-	-	15/06/2021	-	01/07/2021	25/08/2021	-	-	Ditolak
31	30/G/2021/PTUN.SRG	Pertanahan	05/05/2021	06/05/2021	-	-	-	-	06/05/2021	16/06/2021	20/05/2021	07/10/2021	-	-	Tidak Diterima
32	2/P/FP/2021/PTUN.SRG	Permohonan / Fiktif Positif	06/05/2021	-	-	-	-	-	06/05/2021	-	18/05/2021	09/06/2021	-	-	Tidak Diterima
33	31/G/2021/PTUN.SRG	Kepegawaian	10/05/2021	18/05/2021	-	-	-	-	19/05/2021	02/06/2021	22/06/2021	21/09/2021	-	-	Dikabulkan
34	32/G/2021/PTUN.SRG	Kepegawaian	10/05/2021	18/05/2021	-	-	-	-	19/05/2021	02/06/2021	22/06/2021	21/10/2021	-	-	Dikabulkan
35	3/P/FP/2021/PTUN.SRG	Permohonan / Fiktif Positif	11/05/2021	-	-	-	-	-	11/05/2021	-	20/05/2021	10/06/2021	-	-	Tidak Diterima

36	33/G/2021/PTUN .SRG	Pertanahan	24/05/2021	24/05/2021	-	-	-	-	24/05/2021	02/06/2021	01/07/2021	11/10/2021	-	-	Tidak Diterima
37	34/G/2021/PTUN .SRG	Lain-lain	31/05/2021	22/06/2021	-	-	-	-	-	-	-	22/06/2021	-	-	Dismissal
38	35/G/2021/PTUN .SRG	Pertanahan	03/06/2021	08/06/2021	-	-	-	-	08/06/2021	16/06/2021	14/07/2021	18/11/2021	-	-	Tidak Diterima
39	36/G/KI/2021/PTUN.SRG	KIP	11/06/2021	-	-	-	-	-	25/06/2021	-	05/08/2021	19/08/2021	-	-	Ditolak
40	37/G/2021/PTUN .SRG	Lain-lain	14/06/2021	16/06/2021	-	-	-	-	16/06/2021	17/06/2021	13/07/2021	26/10/2021	-	-	Tidak Diterima
41	38/G/2021/PTUN .SRG	Lain-lain	22/06/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	29/06/2021	-	-	Dicabut
42	39/G/TF/2021/PTUN.SRG	Lain-lain	25/06/2021	29/06/2021	-	-	-	-	29/06/2021	06/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	-	-	Dicabut
43	40/G/2021/PTUN .SRG	Lain-lain	30/06/2021	02/07/2021	-	-	-	-	02/07/2021	21/07/2021	25/08/2021	03/11/2021	-	-	Ditolak
44	41/G/2021/PTUN .SRG	Pertanahan	09/07/2021	12/07/2021	-	-	-	-	12/07/2021	28/07/2021	02/09/2021	02/11/2021	-	-	Tidak Diterima
45	42/G/2021/PTUN .SRG	Pertanahan	12/07/2021	12/07/2021	-	-	-	-	12/07/2021	22/07/2021	14/08/2021	08/11/2021	-	-	Dikabulkan
46	43/G/2021/PTUN .SRG	Pertanahan	12/07/2021	12/07/2021	-	-	-	-	12/07/2021	22/07/2021	19/08/2021	27/10/2021	-	-	Dikabulkan
47	44/G/2021/PTUN .SRG	Pertanahan	12/07/2021	12/07/2021	-	-	-	-	12/07/2021	22/07/2021	19/08/2021	27/10/2021	-	-	Dikabulkan
48	45/G/2021/PTUN .SRG	Pertanahan	13/07/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	21/07/2021	-	-	Dicabut
49	46/G/2021/PTUN .SRG	Lain-lain	19/07/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	19/07/2021	-	-	Dicabut

50	47/G/2021/PTUN .SRG	Pertanahan	29/07/2021	23/08/2021	-	-	-	-	-	-	--	23/08/2021	-	-	Dismissal
51	48/G/2021/PTUN .SRG	Lain-lain	30/07/2021	12/08/2021	-	-	-	-	12/08/2021	24/08/2021	14/09/2021	30/11/2021	-	-	Tidak Diterima
52	49/G/2021/PTUN .SRG	Pertanahan	03/08/2021	04/08/2021	-	-	-	-	04/08/2021	18/08/2021	08/09/2021	04/11/2021	-	-	Dicabut
53	50/G/2021/PTUN .SRG	Pertanahan	03/08/2021	04/08/2021	-	-	-	-	04/08/2021	18/08/2021	05/09/2021	25/11/2021	-	-	Ditolak
54	51/G/2021/PTUN .SRG	Lain-lain	05/08/2021	09/08/2021	-	-	-	-	09/08/2021	18/08/2021	08/09/2021	29/12/2021	-	-	Dikabulkan
55	52/G/TF/2021/PTUN.SRG	Lain-lain	09/08/2021	09/08/2021	-	-	-	-	09/08/2021	18/08/2021	15/09/2021	17/11/2021	-	-	Tidak Diterima
56	53/G/2021/PTUN .SRG	Kepegawain	10/08/2021	12/08/2021	-	-	-	-	12/08/2021	24/08/2021	24/09/2021	24/09/2021	-	-	Dicabut
57	54/G/2021/PTUN .SRG	Pertanahan	12/08/2021	12/08/2021	-	-	-	-	12/08/2021	24/08/2021	14/09/2021	21/12/2021	-	-	Tidak Diterima
58	55/G/2021/PTUN .SRG	Pertanahan	12/08/2021	13/08/2021	-	-	-	-	13/08/2021	25/08/2021	14/09/2021	02/12/2021	-	-	Tidak Diterima
59	56/G/2021/PTUN .SRG	Lain-lain	18/08/2021	07/09/2021	-	-	-	-	-	-	-	07/09/2021	-	-	Dismissal
60	57/G/2021/PTUN .SRG	Pertanahan	20/08/2021	30/08/2021	-	-	-	-	30/08/2021	07/09/2021	07/10/2021	03/01/2022	-	-	Tidak Diterima
61	58/G/KI/2021/PTUN.SRG	Keterbukaan Informasi Publik	24/08/2021	-	-	-	-	-	04/10/2021	-	12/10/2021	02/11/2021	-	-	Tidak Diterima
62	59/G/TF/2021/PTUN.SRG	Lain-lain	15/09/2021	16/09/2021	-	-	-	-	16/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	21/10/2021	-	-	Dicabut

63	60/G/2021/PTUN .SRG	Lain-lain	24/09/2021	27/09/2021	-	-	-	-	27/09/2021	05/10/2021	18/10/2021	30/12/2021	-	-	Dikabulkan
64	61/G/2021/PTUN .SRG	Pertanahan	05/10/2021	07/10/2021	-	-	-	-	01/10/2021	14/10/2021	04/11/2021	-	-	√	-
65	62/G/2021/PTUN .SRG	Lain-lain	05/10/2021	07/10/2021	-	-	-	-	07/10/2021	14/10/2021	08/11/2021	-	-	√	-
66	63/G/2021/PTUN .SRG	Lain-lain	14/10/2021	15/10/2021	-	-	-	-	15/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	-	-	√	-
67	64/G/2021/PTUN .SRG	Perijinan	15/10/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	02/11/2021	-	-	Dicabut
68	65/G/2021/PTUN .SRG	Perijinan	18/10/2021	21/10/2021	-	-	-	-	21/10/2021	02/11/2021	30/11/2021	-	-	√	-
69	4/P/FP/2021/PT UN.SRG	Permohonan / Fiktif Positif	26/10/2021	-	-	-	-	-	26/10/2021	-	01/11/2021	24/11/2021	-	-	Tidak Diterima
70	5/P/FP/2021/PT UN.SRG	Permohonan / Fiktif Positif	26/10/2021	-	-	-	-	-	26/10/2021	-	01/11/2021	24/11/2021	-	-	Tidak Diterima
71	66/G/2021/PTUN .SRG	Pertanahan	05/11/2021	08/11/2021	-	-	-	-	08/11/2021	18/11/2021	22/12/2021	-	-	√	-
72	67/G/2021/PTUN .SRG	Perijinan	05/11/2021	08/11/2021	-	-	-	-	08/11/2021	17/10/2021	22/12/2021	-	-	√	-
73	68/G/2021/PTUN .SRG	Lain-lain	05/11/2021	08/11/2021	-	-	-	-	08/11/2021	18/11/2021	16/12/2021	-	-	√	-
74	69/G/TF/2021/PT UN.SRG	Lain-lain	05/11/2021	08/11/2021	-	-	-	-	08/11/2021	17/11/2021	01/12/2021	-	-	√	-
75	70/G/TF/2021/PT UN.SRG	Lain-lain	05/11/2021	08/11/2021	-	-	-	-	08/11/2021	17/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	-	-	Dicabut

76	71/G/2021/PTUN .SRG	Perijinan	09/11/2021	18/11/2021	-	-	-	-	-	-	-	18/11/2021	-	-	Dismissal
77	72/G/TF/2021/PT UN.SRG	Lain-lain	10/11/2021	11/11/2021	-	-	-	-	11/11/2021	18/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	-	-	Dicabut
78	73/G/TF/2021/PT UN.SRG	Lain-lain	11/11/2021	11/11/2021	-	-	-	-	11/11/2021	22/11/2021	06/12/2021	06/12/2021	-	-	Dicabut
79	74/G/2021/PTUN .SRG	Perijinan	19/11/2021	22/11/2021	-	-	-	-	22/11/2021	30/11/2021	21/12/2021	-	-	√	-
80	75/G/2021/PTUN .SRG	Lain-lain	24/11/2021	25/11/2021	-	-	-	-	25/11/2021	06/12/2021	27/12/2021	-	-	√	-
81	76/G/2021/PTUN .SRG	Lain-lain	25/11/2021	26/11/2021	-	-	-	-	26/11/2021	06/12/2021	20/12/2021	-	-	√	-
82	77/G/2021/PTUN .SRG	Lain-lain	25/11/2021	26/11/2021	-	-	-	-	26/11/2021	06/12/2021	20/12/2021	-	-	√	-
83	78/G/2021/PTUN .SRG	Lain-lain	06/12/2021	06/12/2021	-	-	-	-	06/12/2021	14/12/2021	28/12/2021	-	-	√	-
84	79/G/2021/PTUN .SRG	Lain-lain	06/12/2021	07/12/2021	-	-	-	-	07/12/2021	29/12/2021	12/01/2022	-	-	√	-
85	80/G/2021/PTUN .SRG	Lain-lain	13/12/2021	13/12/2021	-	-	-	-	13/12/2021	23/12/2021	-	-	-	√	-
86	81/G/2021/PTUN .SRG	Lain-lain	15/12/2021	16/12/2021	-	-	-	-	16/12/2021	23/12/2021	-	-	-	√	-
87	82/G/2021/PTUN .SRG	Lain-lain	24/12/2021	27/12/2021	-	-	-	-	27/12/2021	05/01/2022	-	-	-	√	-
88	83/G/2021/PTUN .SRG	Pertanahan	29/12/2021	30/12/2021	-	-	-	-	30/12/2021	06/01/2022	-	-	-	√	-
89	84/G/2021/PTUN .SRG	Lain-lain	29/12/2021	30/12/2021	-	-	-	-	30/12/2021	06/01/2022	-	-	-	√	-

Tabel 2.2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

NO.	NOMOR PERKARA	TANGGAL			NO. PERKARA BANDING	KETERANGAN
		PUTUSAN PTUN	PERMOHONAN BANDING	PENGIRIMAN BERKAS		
1	2	4	5	6	7	8
1	62/G/2020/PTUN.SRG	19 - 5 - 2021	24 - 5 - 2021	23 - 7 - 2021	166/B/2021/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 26-10-2021
2	61/G/2020/PTUN.SRG	19 - 5 - 2021	24 - 5 - 2021	23 - 7 - 2021	165/B/2021/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 26-10-2021
3	60/G/2020/PTUN.SRG	19 - 5 - 2021	24 - 5 - 2021	23 - 7 - 2021	164/B/2021/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 18-10-2021
4	59/G/2020/PTUN.SRG	19 - 5 - 2021	24 - 5 - 2021	23 - 7 - 2021	163/B/2021/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 12-10-2021
5	69/G/2020/PTUN.SRG	16 - 6 - 2021	18 - 6 - 2021	14 - 7 - 2021	148/B/2021/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 6-10-2021
6	64/G/2020/PTUN.SRG	22 - 6 - 2021	25 - 6 - 2021	24 - 8 - 2021	197/B/2021/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 8-10-2021
7	71/G/2020/PTUN.SRG	16 - 6 - 2021	29 - 6 - 2021	26 - 7 - 2021	157/B/2021/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 6-10-2021
8	67/G/2020/PTUN.SRG	16 - 6 - 2021	29 - 6 - 2021	26 - 7 - 2021	156/B/2021/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 6-10-2021
9	66/G/2020/PTUN.SRG	16 - 6 - 2021	29 - 6 - 2021	26 - 7 - 2021	155/B/2021/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 6-10-2021
10	5/G/2021/PTUN.SRG	16 - 6 - 2021	2 - 7 - 2021	29 - 7 - 2021	171/B/2021/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 26-10-2021
11	10/G/2021/PTUN.SRG	30 - 6 - 2021	15 - 7 - 2021	9 - 8 - 2021	175/B/2021/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 6-10-2021
12	9/G/2021/PTUN.SRG	30 - 6 - 2021	19 - 7 - 2021	16 - 8 - 2021	179/B/2021/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 4-11-2021
13	3/G/2021/PTUN.SRG	6 - 7 - 2021	23 - 7 - 2021	23 - 8 - 2021	186/B/2021/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 6-10-2021

14	14/G/2021/PTUN.SRG	28 - 7 - 2021	16 - 8 - 2021	13 - 9 - 2021	205/B/2021/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 23-11-2021
15	22/G/2021/PTUN.SRG	8 - 9 - 2021	15 - 9 - 2021	12 - 10 - 2021	246/B/2021/PT.TUN.JKT	
16	27/G/2021/PTUN.SRG	14 - 9 - 2021	23 - 9 - 2021	-	-	Permohonan Banding dicabut tgl 21-10-2021
17	16/G/2021/PTUN.SRG	16 - 9 - 2021	23 - 9 - 2021	21 - 10 - 2021	250/B/2021/PT.TUN.JKT	
18	32/G/2021/PTUN.SRG	21 - 9 - 2021	24 - 9 - 2021	25 - 10 - 2021	253/B/2021/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 7-12-2021
19	31/G/2021/PTUN.SRG	21 - 9 - 2021	24 - 9 - 2021	25 - 10 - 2021	252/B/2021/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 6-12-2021
20	15/G/2021/PTUN.SRG	22 - 9 - 2021	6 - 10 - 2021	4 - 11 - 2021	262/B/2021/PT.TUN.JKT	
21	30/G/2021/PTUN.SRG	7 - 10 - 2021	18 - 10 - 2021	15 - 11 - 2021	275/B/2021/PT.TUN.JKT	
22	44/G/2021/PTUN.SRG	27 - 10 - 2021	4 - 11 - 2021	1 - 12 - 2021	288/B/2021/PT.TUN.JKT	
23	43/G/2021/PTUN.SRG	27 - 10 - 2021	4 - 11 - 2021	1 - 12 - 2021	289/B/2021/PT.TUN.JKT	
24	25/G/2021/PTUN.SRG	28 - 10 - 2021	4 - 11 - 2021	1 - 12 - 2021	287/B/2021/PT.TUN.JKT	
25	42/G/2021/PTUN.SRG	8 - 11 - 2021	10 - 11 - 2021	7 - 12 - 2021	293/B/2021/PT.TUN.JKT	
26	40/G/2021/PTUN.SRG	3 - 11 - 2021	17 - 11 - 2021	15 - 12 - 2021	297/B/2021/PT.TUN.JKT	
27	52/G/TF/2021/PTUN.SRG	17 - 11 - 2021	6 - 12 - 2021	-	-	
28	50/G/2021/PTUN.SRG	25 - 11 - 2021	9 - 12 - 2021	-	-	
29	55/G/2021/PTUN.SRG	2 - 12 - 2021	13 - 12 - 2021	-	-	

Tabel 2.3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

NO.	NOMOR PERKARA P.TUN	TANGGAL					NO. PERKARA KASASI	KETERANGAN
		PENERIMAAN BERKAS PT TUN OLEH PTUN	PUTUSAN PT TUN	PEMBERITAHUAN PUTUSAN PT TUN	PERMOHONAN KASASI	PENGIRIMAN BERKAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	61/G/2019/PTUN.SRG	2 - 11 - 2020	20 - 10 - 2020	3 - 11 - 2020	10 - 11 - 2020	20 - 1 - 2021	-	-
2	58/G/2019/PTUN.SRG	4 - 11 - 2020	26 - 10 - 2020	6 - 11 - 2020	16 - 11 - 2020	18 - 1 - 2021	226 K/TUN/2021	Pemberitahuan Putusan Kasasi tgl 15-11-2021
3	60/G/2019/PTUN.SRG	22 - 9 - 2020	15 - 9 - 2020	23 - 9 - 2020	25 - 11 - 2020	11 - 1 - 2021	-	-
4	10/G/2020/PTUN.SRG	16 - 11 - 2020	10 - 11 - 2020	17 - 11 - 2020	26 - 11 - 2020	7 - 1 - 2021	141 K/TUN/2021	Pemberitahuan Putusan Kasasi tgl 14-9-2021
5	30/G/2020/PTUN.SRG	13 - 1 - 2021	8 - 1 - 2021	14 - 1 - 2021	29 - 1 - 2021	4 - 3 - 2021	-	-
6	50/G/KI/2020/PTUN.SRG	-	-	-	10 - 2 - 2021	23 - 3 - 2021	171 K/TUN/2021	Pemberitahuan Putusan Kasasi tgl 15-11-2021
7	29/G/2020/PTUN.SRG	10 - 2 - 2021	4 - 2 - 2021	11 - 2 - 2021	18 - 2 - 2021	16 - 3 - 2021	167 K/TUN/2021	Pemberitahuan Putusan Kasasi tgl 16-11-2021
8	24/G/2020/PTUN.SRG	9 - 2 - 2021	1 - 2 - 2021	9 - 2 - 2021	22 - 2 - 2021	23 - 3 - 2021	172 K/TUN/2021	Pemberitahuan Putusan Kasasi tgl 11-11-2021
9	14/G/TF/2020/PTUN.SRG	10 - 3 - 2021	2 - 3 - 2021	15 - 3 - 2021	29 - 2 - 2021	5 - 5 - 2021	-	-
10	63/G/KI/2020/PTUN.SRG	-	-	-	9 - 3 - 2021	20 - 5 - 2021	353 K/TUN/KI/2021	Pemberitahuan Putusan Kasasi tgl 10-11-2021
11	26/G/2020/PTUN.SRG	1 - 3 - 2021	23 - 2 - 2021	2 - 3 - 2021	15 - 3 - 2021	19 - 4 - 2021	198 K/TUN/2021	Pemberitahuan Putusan Kasasi tgl 10-11-2021
12	28/G/2020/PTUN.SRG	2 - 4 - 2021	15 - 3 - 2021	5 - 4 - 2021	16 - 4 - 2021	22 - 6 - 2021	-	-
13	38/G/2020/PTUN.SRG	19 - 4 - 2021	15 - 4 - 2021	21 - 4 - 2021	30 - 4 - 2021	22 - 6 - 2021	-	-

14	33/G/2020/PTUN.SRG	3 - 5 - 2021	22 - 4 - 2021	4 - 5 - 2021	17 - 5 - 2021	17 - 6 - 2021	-	
15	37/G/2020/PTUN.SRG	10 - 5 - 2021	4 - 5 - 2021	11 - 5 - 2021	21 - 5 - 2021	27 - 7 - 2021	-	
16	43/G/2020/PTUN.SRG	3 - 5 - 2021	22 - 4 - 2021	11 - 5 - 2021	27 - 5 - 2021	27 - 7 - 2021	-	
17	18/G/KI/2021/PTUN.SRG	-	-	-	13 - 7 - 2021	13 - 9 - 2021	-	
18	17/G/KI/2021/PTUN.SRG	-	-	-	13 - 7 - 2021	13 - 9 - 2021	-	
19	20/G/KI/2021/PTUN.SRG	-	-	-	26 - 7 - 2021	5 - 10 - 2021	-	
20	19/G/KI/2021/PTUN.SRG	-	-	-	26 - 7 - 2021	5 - 10 - 2021	-	
21	36/G/2020/PTUN.SRG	21 - 7 - 2021	1 - 7 - 2021	26 - 7 - 2021	30 - 7 - 2021	15 - 10 - 2021	-	
22	58/G/2020/PTUN.SRG	9 - 8 - 2021	3 - 8 - 2021	16 - 8 - 2021	19 - 8 - 2021	27 - 10 - 2021	-	
23	36/G/KI/2021/PTUN.SRG	-	-	-	31 - 8 - 2021	4 - 10 - 2021	-	
24	2/G/2021/PTUN.SRG	19 - 8 - 2021	10 - 8 - 2021	19 - 8 - 2021	1 - 9 - 2021	8 - 11 - 2021	-	
25	40/G/2020/PTUN.SRG	23 - 8 - 2021	10 - 8 - 2021	23 - 8 - 2021	6 - 9 - 2021	4 - 11 - 2021	-	
26	3/G/2021/PTUN.SRG	6 - 10 - 2021	6 - 10 - 2021	29 - 9 - 2021	13 - 10 - 2021	-	-	Tidak Memenuhi Syarat Formil tgl 1-12-2021
27	64/G/2020/PTUN.SRG	7 - 10 - 2021	28 - 9 - 2021	8 - 10 - 2021	22 - 10 - 2021	24 - 11 - 2021	-	
28	60/G/2020/PTUN.SRG	14 - 10 - 2021	4 - 10 - 2021	18 - 10 - 2021	25 - 10 - 2021	9 - 12 - 2021	-	
29	59/G/2020/PTUN.SRG	11 - 10 - 2021	4 - 10 - 2021	12 - 10 - 2021	25 - 10 - 2021	9 - 12 - 2021	-	
30	62/G/2020/PTUN.SRG	19 - 10 - 2021	12 - 10 - 2021	26 - 10 - 2021	5 - 11 - 2021	9 - 12 - 2021	-	
31	61/G/2020/PTUN.SRG	19 - 10 - 2021	12 - 10 - 2021	26 - 10 - 2021	5 - 11 - 2021	9 - 12 - 2021	-	
32	5/G/2021/PTUN.SRG	26 - 10 - 2021	19 - 10 - 2021	26 - 10 - 2021	8 - 11 - 2021	-	-	
33	9/G/2021/PTUN.SRG	4 - 11 - 2021	2 - 11 - 2021	4 - 11 - 2021	17 - 11 - 2021	-	-	
34	32/G/2021/PTUN.SRG	7 - 11 - 2021	2 - 11 - 2021	7 - 11 - 2021	17 - 12 - 2021	-	-	
35	31/G/2021/PTUN.SRG	6 - 12 - 2021	2 - 12 - 2021	6 - 12 - 2021	17 - 12 - 2021	-	-	

Tabel 2.4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

NO	NOMOR PERKARA P.TUN	TANGGAL					NO. PERKARA PK	KETERANGAN
		PENERIMAAN BERKAS MA-RI	PUTUSAN KASASI	PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI	PERMOHONAN PK	PENGIRIMAN BERKAS PK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	14/G/2017/PTUN.SRG	19 - 2 - 2020	24 - 10 - 2020	19 - 2 - 2020	12 - 1 - 2021	19 - 5 - 2020	-	PK di atas PK
2	36/G/2019/PTUN.SRG	19 - 3 - 2021	28 - 9 - 2020	22 - 3 - 2021	5 - 4 - 2021	8 - 6 - 2021	109 PK/TUN/2021	Pemberitahuan Putusan PK 20-9-2021
3	60/G/2019/PTUN.SRG	Perkara Kasasi Tidak Memenuhi Syarat Formil			6 - 7 - 2021	4 - 10 - 2021	-	-
4	35/G/2019/PTUN.SRG	15 - 3 - 2021	26 - 10 - 2021	16 - 3 - 2021	10 - 9 - 2021	11 - 10 - 2021	-	-
5	6/G/2020/PTUN.SRG	3 - 8 - 2021	6 - 4 - 2021	3 - 8 - 2021	10 - 9 - 2021	25 - 11 - 2021	-	-
6	34/G/2019/PTUN.SRG	22 - 3 - 2021	26 - 10 - 2020	22 - 3 - 2021	16 - 9 - 2021	25 - 10 - 2021	-	-
7	66/G/2019/PTUN.SRG	28 - 5 - 2021	2 - 3 - 2020	31 - 5 - 2021	23 - 9 - 2021	25 - 10 - 2021	-	-
8	4/G/2019/PTUN.SRG	21 - 4 - 2021	17 - 2 - 2020	22 - 4 - 2021	28 - 9 - 2021	17 - 12 - 2021	-	-
9	5/G/2020/PTUN.SRG	8 - 7 - 2021	2 - 3 - 2020	9 - 7 - 2021	1 - 10 - 2021	13 - 10 - 2021	-	-
10	9/G/2020/PTUN.SRG	18 - 8 - 2021	27 - 4 - 2020	19 - 8 - 2021	29 - 11 - 2021	4 - 10 - 2021	-	-

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2021 masih terdapat 20 (dua puluh) Perkara Sisa, dari jumlah Perkara yang diselesaikan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) Perkara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Sisa Perkara
1	2	3
A	GUGATAN	
1	Pertanahan	37
2	Kepegawaian	3
3	Perijinan	1
4	Lingkungan Hidup	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-
6	Badan Hukum/Parpol	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-
8	Kepala Daerah	-
9	Proses Pemilihan Umum	-
10	Penggantian Antar Waktu	-
11	Ketenagakerjaan	-
12	Sengketa Informasi Publik (KIP)	10
13	Pengadaan Tanah	-
14	Fiktif Positif	5
15	Penyalahgunaan Wewenang	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-
17	Merek	-
18	Lain-lain	13
JUMLAH		69

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2021 terdapat Perkara yang Putus Kurang dari 3 (tiga) Bulan sejumlah 21 (dua puluh satu) Perkara, Perkara yang putus 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) Bulan sejumlah 38 (tiga puluh tiga) Perkara, dan Perkara putus 5 (lima) sampai dengan 12 (dua

belas) Bulan sejumlah 21 (dua puluh satu perkara) Perkara dari jumlah Perkara yang diselesaikan sebanyak 80 (enam puluh tujuh) Perkara.

Tabel 2.6. Penyelesaian Perkara Tahun 2021

No	PERKARA PUTUS TAHUN 2021		
	KURANG DARI 3 BULAN	3 – 5 BULAN	5 – 12 BULAN
1	2	3	4
1		50/G/KI/2020/PTUN.SRG	
2			36/G/2020/PTUN.SRG
3			40/G/2020/PTUN.SRG
4		45/G/2020/PTUN.SRG	
5		46/G/2020/PTUN.SRG	
6		53/G/2020/PTUN.SRG	
7	63/G/KI/2020/PTUN.SRG		
8		47/G/2020/PTUN.SRG	
9		57/G/2020/PTUN.SRG	
10		58/G/2020/PTUN.SRG	
11			59/G/2020/PTUN.SRG
12			60/G/2020/PTUN.SRG
13			61/G/2020/PTUN.SRG
14			62/G/2020/PTUN.SRG
15			64/G/2020/PTUN.SRG
16			66/G/2020/PTUN.SRG
17			67/G/2020/PTUN.SRG
18			69/G/2020/PTUN.SRG
19			71/G/2020/PTUN.SRG
20		2/G/2021/PTUN.SRG	
21	4/G/KI/2021/PTUN.SRG		
22	1/P/FP/2021/PTUN.SRG		
23		5/G/2021/PTUN.SRG	
24		6/G/2021/PTUN.SRG	
25		7/G/2021/PTUN.SRG	
26		9/G/2021/PTUN.SRG	
27		10/G/2021/PTUN.SRG	
28	2/P/FP/2021/PTUN.SRG		
29	3/P/FP/2021/PTUN.SRG		
30			3/G/2021/PTUN.SRG
31		14/G/2021/PTUN.SRG	
32		17/G/KI/2021/PTUN.SRG	
33		18/G/KI/2021/PTUN.SRG	
34		19/G/KI/2021/PTUN.SRG	
35		20/G/KI/2021/PTUN.SRG	
36	45/G/2021/PTUN.SRG		
37	46/G/2021/PTUN.SRG		
38			12/G/2021/PTUN.SRG
39		24/G/2021/PTUN.SRG	
40		29/G/KI/2021/PTUN.SRG	
41	36/G/KI/2021/PTUN.SRG		
42	39/G/TF/2021/PTUN.SRG		

43	47/G/2021/PTUN.SRG		
44			1/G/2021/PTUN.SRG
45			15/G/2021/PTUN.SRG
46			16/G/2021/PTUN.SRG
47			22/G/2021/PTUN.SRG
48		27/G/2021/PTUN.SRG	
49		31/G/2021/PTUN.SRG	
50		32/G/2021/PTUN.SRG	
51	53/G/2021/PTUN.SRG		
52	56/G/2021/PTUN.SRG		
53			23/G/2021/PTUN.SRG
54			25/G/2021/PTUN.SRG
55			30/G/2021/PTUN.SRG
56		33/G/2021/PTUN.SRG	
57		37/G/2021/PTUN.SRG	
58		43/G/2021/PTUN.SRG	
59		44/G/2021/PTUN.SRG	
60	59/G/TF/2021/PTUN.SRG		
61			35/G/2021/PTUN.SRG
62		40/G/2021/PTUN.SRG	
63		41/G/2021/PTUN.SRG	
64		42/G/2021/PTUN.SRG	
65		48/G/2021/PTUN.SRG	
66		49/G/2021/PTUN.SRG	
67		50/G/2021/PTUN.SRG	
68		52/G/TF/2021/PTUN.SRG	
69	58/G/KI/2021/PTUN.SRG		
70	64/G/2021/PTUN.SRG		
71	4/P/FP/2021/PTUN.SRG		
72	5/P/FP/2021/PTUN.SRG		
73	70/G/TF/2021/PTUN.SRG		
74	71/G/2021/PTUN.SRG		
75		51/G/2021/PTUN.SRG	
76		54/G/2021/PTUN.SRG	
77		55/G/2021/PTUN.SRG	
78		60/G/2021/PTUN.SRG	
79	72/G/TF/2021/PTUN.SRG		
80	73/G/TF/2021/PTUN.SRG		
JML	21 Perkara	38 Perkara	21 Perkara

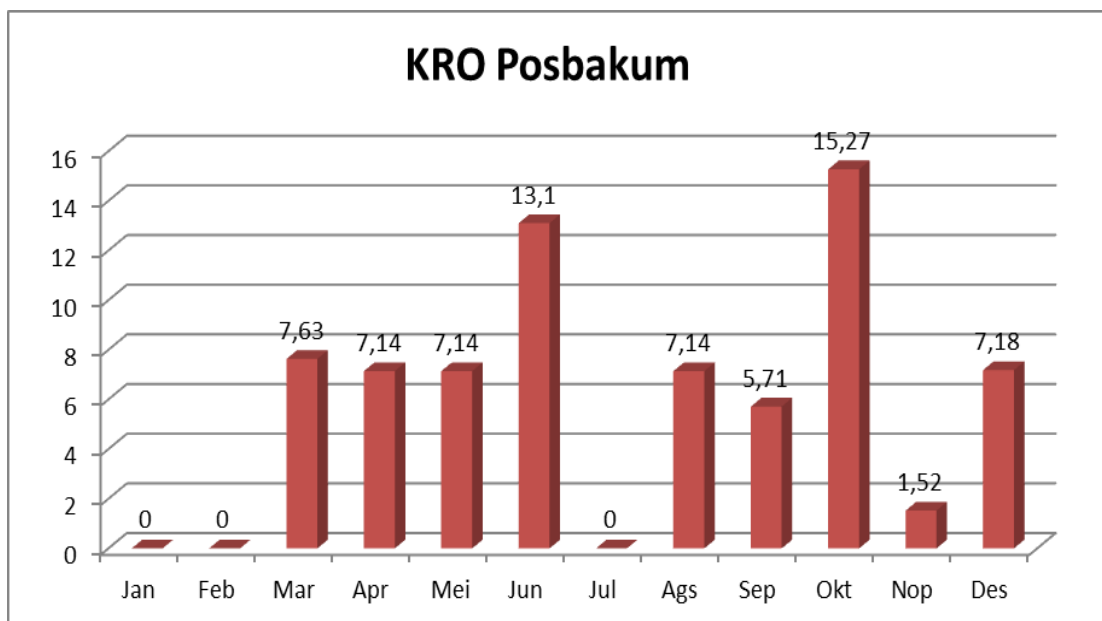
3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 70 (tujuh puluh) perkara
4. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 62 (enam puluh dua) perkara
5. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) 84 (delapan puluh empat) perkara

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

1. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum adalah Layanan yang dibentuk oleh Pengadilan tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan *advice* hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam rangka pemertaaan akan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu (*Justice For All*), maka disusunlah suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat dengan dibiayai oleh negara.

Dalam tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan jumlah layanan dalam Dipa sebanyak 288 Jam Layanan dengan Biaya sebesar Rp33.000.000,- dengan target volume sebanyak 96 orang yang seluruhnya dibiayai dari anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA-05) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.



Gambar: 2.1. Grafik Penyerapan Anggaran Posbakum T.A. 2021

Pos Pelayanan Hukum (Posbakum) pada Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah melaksanakan kegiatan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan *advice* hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang

dibutuhkan untuk tahun anggaran 2021 telah melayani sebanyak 77 orang. Maka berdasarkan realisasi pelayanan tersebut capaiannya adalah sebesar 80,21%.

2. Prodeo

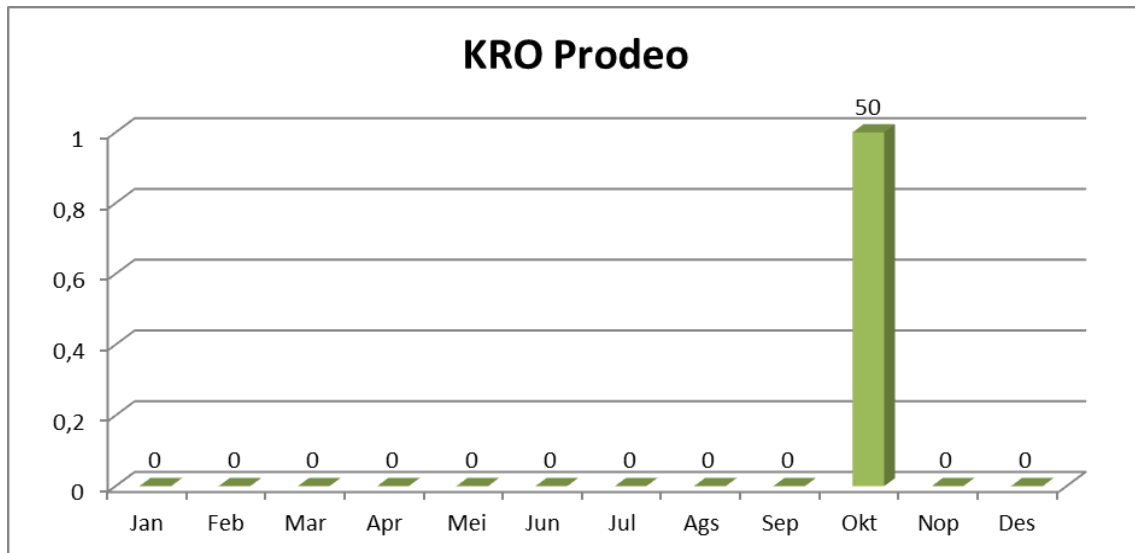
Prodeo adalah Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sehingga setiap orang yang tidak mampu secara finansial dapat berperkara secara cuma-cuma.

Untuk tahun anggaran 2021 melalui DIPA-05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara, Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menargetkan sebanyak 2 (dua) perkara yang akan diselesaikan dengan memanfaatkan layanan pembebasan biaya berperkara (prodeo) dengan alokasi anggaran pembebasan biaya panjar perkara prodeo sebesar Rp450.000,- per perkara dengan total anggaran Rp900.000,-

Adapun dalam kurun waktu tahun anggaran 2021 tidak ada realisasi prodeo untuk tingkat pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, akan tetapi pada tingkat Kasasi ada pihak berperkara yang mengajukan pemanfaatan pembebasan biaya berperkara. Hal tersebut membuat Satker kesulitan dalam merealisasikannya dan harus mengadakan revisi DIPA antar Satker pada tingkat Pusat. Oleh karena Posbakum dan Prodeo adalah Program Prioritas Nasional (Pronas) maka Revisi hanya bisa dimungkinkan jika ada Satker dalam satu Korwil yang memiliki Klasifikasi Rincian Output (KRO) sama tidak terpakai dan diprediksi tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran. Pada akhirnya revisi DIPA antar Satker untuk memenuhi permintaan Prodeo pada tingkat Kasasi dapat dipenuhi dengan menggeser anggaran dari Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga jumlah anggaran Prodeo pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Serang bertambah menjadi Rp1.800.000,- dan merubah target perkara Prodeo menjadi 3 (tiga) Perkara.

Realisasi Klasifikasi Rincian Output (KRO) pada pembebasan biaya perkara (Prodeo) adalah dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar: 2.2. Grafik Penyerapan Anggaran Prodeo T.A. 2021

Pada grafik di atas dapat dikatakan bahwa realisasi secara anggaran adalah sebesar 50% karena adanya realisasi prodeo pada tingkat Kasasi yang mempergunakan dana sebesar Rp900.000,- akan tetapi realisasi secara fisik (perkara) adalah sebesar 33,33% karena dari 3 (tiga) Perkara yang menjadi Volume Target dapat diselesaikan 1 (satu) Perkara.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi sangat penting dan menentukan, karena Sumber Daya manusia adalah roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat cakap, berkualitas, profesional, berdaya guna dan sadar akan tanggung jawab. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola Sumber Daya manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya.

Dengan beban kerja yang ada dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi jumlah, pendidikan dan kompetensi, Sumber Daya Manusia di Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial, Sumber Daya Manusia Bidang Non Teknis Yudisial dan Tenaga Honorar atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial menangani administrasi bagian Keperkerajaan sedangkan Sumber Daya Manusia Bidang Non Teknis Yudisial menangani administrasi umum Kesekretariatan.

Adapun komposisi Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

Tabel 3.1. Komposisi SDM Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

NO	JABATAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN		GOL. IV					GOL. III				GOL. II				GOL. I				PENDIDIKAN						
			LK	PR	a	b	c	d	e	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	S.3	S.2	S.1	D.3	SLA	SMP	SD
I	HAKIM																											
	1. Ketua	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	2. Wakil Ketua	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	3. Hakim	12	6	6	2	2	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	-	-	-	-
4. Calon Hakim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	KEPANITERAAN																											
	1. Panitera	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	2. Panitera Muda	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
	3. Panitera Pengganti	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	
	4. Juru Sita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5. Juru Sita Pengganti	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
6. Calon Juru Sita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III	KESEKRETARIATAN																											
	1. Sekretaris	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	2. Ka.Sub.Bag. Kepegawaian dan Ortala	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	3. Ka.Sub.Bag. Umum dan Keuangan	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	4. Ka.Sub.Bag. Perencanaan TI dan Pelaporan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	5. Pejabat Fungsional	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
6. Staff	3	2	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-		
IV	PEGAWAI PEMERINTAN NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)	14	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	3	-	-		
J U M L A H		45	27	18	2	4	-	1	1	3	2	6	10	-	-	1	-	-	-	-	1	14	25	2	3	-	-	

B. Mutasi

Rekapitulasi mutasi hakim dan pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2021 :

Tabel 3.2. Rekapitulasi Mutasi Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

NO.	JABATAN	MUTASI MASUK	MUTASI KELUAR	KET.
I.	HAKIM			
	1. Ketua	-	-	
	2. Wakil Ketua	1	-	TMT Agustus
	3. Hakim	4	3	
	4. Calon Hakim	-	-	
II.	KEPANITERAAN			
	1. Panitera	-	-	
	2. Panitera Muda	1	1	TMT Juni
	3. Panitera Pengganti	1	1	TMT Oktober
	4. Juru Sita	-	-	
	5. Juru Sita Pengganti	-	-	
	6. Calon Juru Sita	-	-	
III.	KESEKRETARIATAN			
	1. Sekretaris	-	-	
	2. Ka.Sub.Bag. Kepegawaian dan Ortala	-	-	
	3. Ka.Sub.Bag. Umum dan Keuangan	-	-	
	4. Ka.Sub.Bag. Perencanaan TI dan Pelaporan	-	-	
	5. Staf	-	-	
	JUMLAH	7	5	

C. Promosi

Rekapitulasi promosi hakim dan pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2021:

Tabel 3.3. Rekapitulasi Promosi Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

NO.	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
I.	HAKIM		
	1. Ketua	-	-
	2. Wakil Ketua	-	-
	3. Hakim	1	Diangkat menjadi Wakil Ketua pada PTUN Jambi
	4. Calon Hakim	-	-

II.	KEPANITERAAN		
	1. Panitera	-	-
	2. Panitera Muda	-	-
	3. Panitera Pengganti	-	-
	4. Juru Sita	-	-
	5. Juru Sita Pengganti	-	-
	6. Calon Juru Sita	-	-
III.	KESEKRETARIATAN		
	1. Sekretaris	-	-
	2. Ka.Sub.Bag. Kepegawaian dan Ortala	-	-
	3. Ka.Sub.Bag. Umum dan Keuangan	-	-
	4. Ka.Sub.Bag. Perencanaan TI dan Pelaporan	-	-
	5. Staf	1	Diangkat menjadi Analis Kepegawaian Ahli Pertama pada PTUN Serang
JUMLAH		2	

D. Pensiun

Tabel 3.4. Rekapitulasi Pensiun Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

NO.	JABATAN	JUMLAH	TMT PENSIUN	KET.
I.	HAKIM			
	1. Ketua	-	-	-
	2. Wakil Ketua	1	1 Juli 2021	BUP (65 Tahun)
	3. Hakim	-	-	-
	4. Calon Hakim	-	-	-
II.	KEPANITERAAN			
	1. Panitera	-	-	-
	2. Panitera Muda	-	-	-
	3. Panitera Pengganti	-	-	-
	4. Juru Sita	-	-	-
	5. Juru Sita Pengganti	-	-	-
	6. Calon Juru Sita	-	-	-
III.	KESEKRETARIATAN			
	1. Sekretaris	-	-	-
	2. Ka.Sub.Bag. Kepegawaian dan Ortala	-	-	-
	3. Ka.Sub.Bag. Umum dan Keuangan	-	-	-
	4. Ka.Sub.Bag. Perencanaan TI dan Pelaporan	-	-	-
	5. Staf	-	-	-
JUMLAH		1		

E. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Secara umum pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka terutama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan atau manajerial yang diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Kemampuan ASN untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai waktu yang ditetapkan sangat penting sebab jika tidak maka kita akan ketinggalan dengan negara-negara lain yang kualitas sumber daya aparaturnya lebih tinggi, maka perlu melakukan pengembangan kompetensi aparatur agar terdapat keseimbangan antara beban kerja dengan kompetensi aparatur. Karena diyakini, melalui pengembangan kompetensi inilah diharapkan dapat menjawab persoalan yang terus berkembang.

Guna meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial serta dalam rangka melakukan Pembinaan, Pengelolaan terhadap Sumber Daya Manusia, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengikutsertakan Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan Staf potensial untuk mengikuti pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Koordinator Wilayah (Korwil).

Daftar Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan pada tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5. Monitoring Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis Hakim dan Pegawai
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Periode Tahun 2021

No	Jenis Kegiatan	Nama Peserta	Jabatan	Tanggal Kegiatan
1	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dari Tempat Tugas	Sufi Aryani, S.E.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	4 Januari s.d. 19 Februari 2021
		Masuri, S.E.	Kasubbag PTIP	
2	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pertanahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja bagi Hakim Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	Yustika Hardwiandita, S.H.	Hakim	1 s.d. 23 Maret 2021
		Febrina Permadi, S.H.		
3	Pelatihan Online Manajemen Aset Gelombang I	Taufik Rahman, S.Sos. M.M.	Kasubbag Umum dan Keuangan	3 s.d. 5 Januari 2021
4	Bimbingan Teknis Persidangan Secara Elektronik Bagi Hakim Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	H. Eri Elfi Ritonga, S.H., M.H.	Hakim	3 s.d. 5 Maret 2021
		M. Ikbar Andi Endang, S.H., M.H.		

5	Pelatihan Online Basic Image Editing With Adobe Photoshop Kelas 05 s.d. 06 dari Tempat Tugas	Hambali, S.H., M.H.	Hakim	1 s.d. 5 Maret 2021
6	Pelaksanaan Program E-Learning Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan III	Jimmy Fernando Dapot Sianturi, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	22 Februari 2021 s.d. 2 Maret 2021
7	Pelatihan Online Basic Modeling with 3D Max Kelas 03 dan 04 dari Tempat Tugas	Suhendra, S.H., M.H.	Panitera	1 s.d. 5 Maret 2021
8	Pelatihan Online Basic Modeling with 3D Max Kelas 03 dan 04 dari Tempat Tugas	Jimmy Fernando Dapot Sianturi, S.H., M.H.	Analisis Perkara Peradilan	1 s.d. 5 Maret 2021
9	Pelatihan Online Mentoring bagi Mentor Peserta PKP Gelombang I	Suhendra, S.H., M.H.	Panitera	3 s.d. 8 Maret 2021
10	Pelatihan Online Teknik Penyusunan IKU dan RENSTRA dari tempat tugas.	Taufik Rahman, S.Sos., M.M	Kasubbag Umum dan Keuangan	15 s.d. 19 Maret 2021
11	Kegiatan Penyusunan / Review Kurikulum dan Silabus Pelatihan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Dhonni Adhita Saputra, S.H.	Panmud Perkara	23 sd. 26 Maret 2021
12	Pelatihan Online English Effective Presentation bagi Peserta PKP Gelombang I Angkatan XVII s.d. XXV dari Tempat Tugas	Sufi Aryani, S.E.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	31 Maret s.d. 4 April 2021
		Masuri, S.E.	Kasubbag PTIP	

13	Bimbingan Teknis Upaya Hukum Banding secara Elektronik di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 2021.	Herry Wibawa, S.H., M.H.	Ketua	8 s.d. 10 April 2021
		Suhendra, S.H., M.H.	Panitera	
		Dhonni Adhita Saputra, S.H.	Panmud Perkara	
14	Pelatihan E-Learning Penyusunan Laporan Kinerja	Taufik Rahman, S.Sos., M.M.	Kasubbag Umum dan Keuangan	5 s.d. 7 Juli 2021
15	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Perizinan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja bagi Hakim Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	M. Ikbar Andi Endang, S.H., M.H.	Hakim	5 s.d. 19 Juli 2021
		Febrina Permadi, S.H.		
16	Pelatihan sebagai pengajar pendidikan khusus profesi advokat	H. Eri Elfi Ritonga, S.H., M.H.	Hakim	8 Agustus 2021
17	Pelatihan teknis yudisial sengketa pengujian unsur penyalahgunaan wewenang Tahap I (Metode belajar online mandiri)	Noor Halim, S.H., MH.	Hakim	23 s.d. 27 Agustus 2021
18	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti	Hambali, S.H. M.H.	Panitera Pengganti	16 s.d 30 Agustus 2021
		Elvina Rentalya Tampubolon, S.H., M.H.		

19	Pelatihan Membangun Pola Pikir Berkelanjutan dan Kecepatan Pembelajaran (<i>Cultivating Growth Mindset and Learning Agility</i>)	Fitri Indriati Novita, A.Md. Kom.	Staff	3 s.d. 8 Agustus 2021
20	Pelatihan Manajemen Keuangan Negara (Manajemen Komitmen)	Taufik Rahman, S.Sos., M.M.	Kasubbag Umum dan Keuangan	11 s.d. 19 Agustus 2021
21	Pelatihan Manajemen Keuangan Negara (Pelaporan dan Pertanggung jawaban)	Hambali, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	23 s.d. 27 Agustus 2021
22	Pelatihan Manajemen Keuangan Negara (Pelaporan dan Pertanggung jawaban)	Taufik Rahman, S.Sos., M.M.	Kasubbag Umum dan Keuangan	20 Agustus sd. 3 September 2021
23	Pelatihan teknik menyusun resume putusan pengadilan (<i>summary</i>)	Hambali, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	11 s.d. 12 Agustus 2021
24	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Tata Usaha Negara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bagi Hakim Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	M. Herry Indrawan Pattiradja, S.Sos., S.H., M.M.	Hakim	
		Febrina Permadi, S.H.		
25	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti Tingkat Pertama Gel. 2 Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia pada Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Suhendra, S.H., M.H.	Panitera	18 sd. 29 Oktober 2021
		Sopiah, S.H.	Panitera Pengganti	
		Wirdayati, A.Md.		
26	Bimbingan Teknis Peme-riksaan Sengketa Barang/ Jasa Pemerintah Bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI	Julia Saragih, S.H., M.H.	Hakim	27 sd. 29 Oktober 2021
		Rizki Yustika Putri, S.H.		

27	Bimbingan Teknis Sosialisasi Tentang Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 di Lingkungan Peradilan Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.	Herry Wibawa, S.H., M.H.	Ketua	27 s.d. 29 Oktober 2021
		Suhendra, S.H., M.H.	Panitera	
		Nurhasanah, S.H.	Sekretaris	
28	Bimbingan Teknis Pelayanan Disabilitas di Lingkungan Peradilan Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.	Darmawiyadi, S.H.	Panmud Perkara	27 s.d. 10 Oktober 2021
		Taufik Rahman, S.Sos. M.M.	Kasubbag Umum dan Keuangan	
29	Workshop Online Hakim Council of Asean Chief Justice (CACJ) yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Teknis MARI bekerjasama dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) didukung Anggaan Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia	Retno Aryandi, S.H.	Hakim	1 s.d. 4 Nopember 2021
30	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XV Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Teknis MARI bekerjasama dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) didukung Anggaan Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia	Febrina Permadi, S.H.	Hakim	1 Nopember s.d. 2 Desember 2021

31	Training of Trainers (ToT) Reguler Bagi Hakim dan Panitera 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indoensia pada Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI Tahun 2021	Dr. Umar Dani, S.H., M.H.	Hakim	3 s.d. 12 Nopember 2021
		Hery Abduh Sasmito, S.H., M.H.		
32	Focus Grup Discusion (FGD) Bersama Mitra Lembaga di Provinsi Banten perihal Permohonan Narasumber yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.	M. Herry Hendrawan Pattiradja, S.Sos., S.H., M.H.	Hakim	10 Nopember 2021
		Rizki Yustika Putri, S.H.		

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2021 tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021, yaitu:

1. Nomor DIPA-005.01.2.689313/2022 Tanggal 23 November 2020 dengan 2 (dua) Program Kegiatan yakni Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.479.105.000,- (Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Ribu Rupiah).
2. Nomor DIPA-005.05.2.690202/2022 Tanggal 23 November 2020 dengan 1 (satu) Program Kegiatan yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) dengan alokasi anggaran sebesar Rp37.800.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

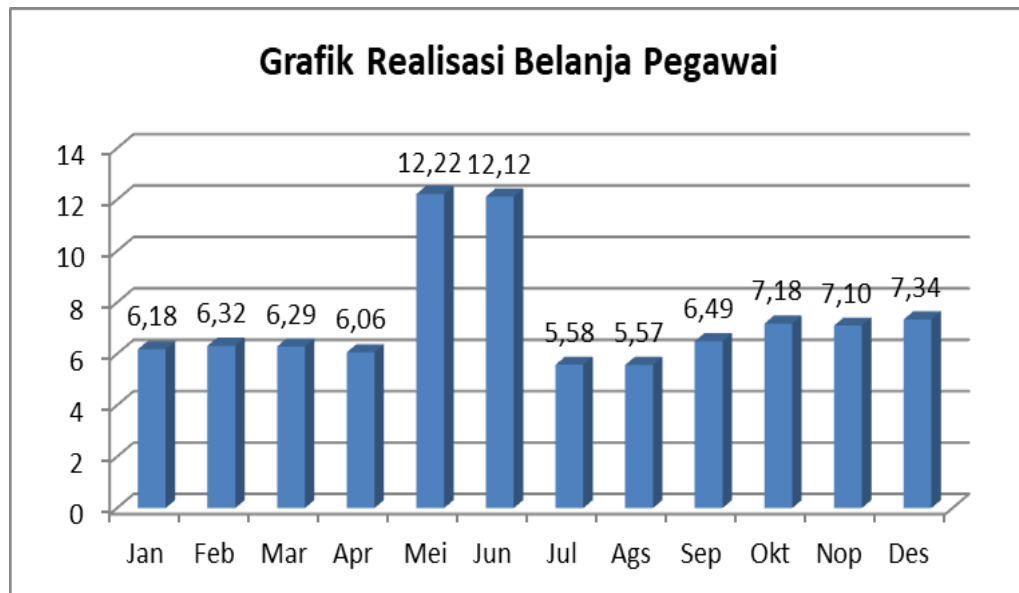
Jumlah keseluruhan alokasi Anggaran dari DIPA 01 dan 05 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2021 adalah Rp8.516.905.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah). Dari pagu anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 7.702.231.271,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dengan serapan sebesar 90,43 %.

Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA-005.01.2.689313/2021 Tanggal 23 November 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun Anggaran 2021.

a) Belanja Pegawai

Tabel 4.1. Realisasi Belanja Pegawai

NO.	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	KET (%)
1	Belanja Pegawai	5.991.067.000,-	5.298.892.668	692.174.332,-	88,45%

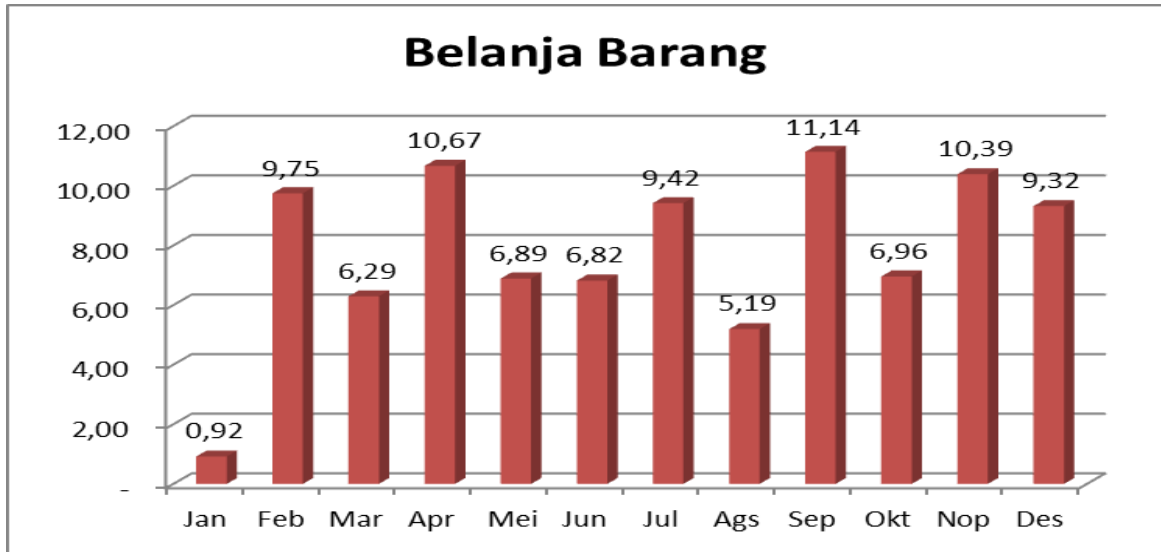


Gambar: 4.1. Grafik Realisasi Belanja Pegawai

b) Belanja Barang Operasional

Tabel 4.2. Realisasi Belanja Barang Operasional

NO.	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	KET (%)
1	Belanja Barang	1.996.538.000,-	1.884.090.005,-	112.447.995,-	94,37%



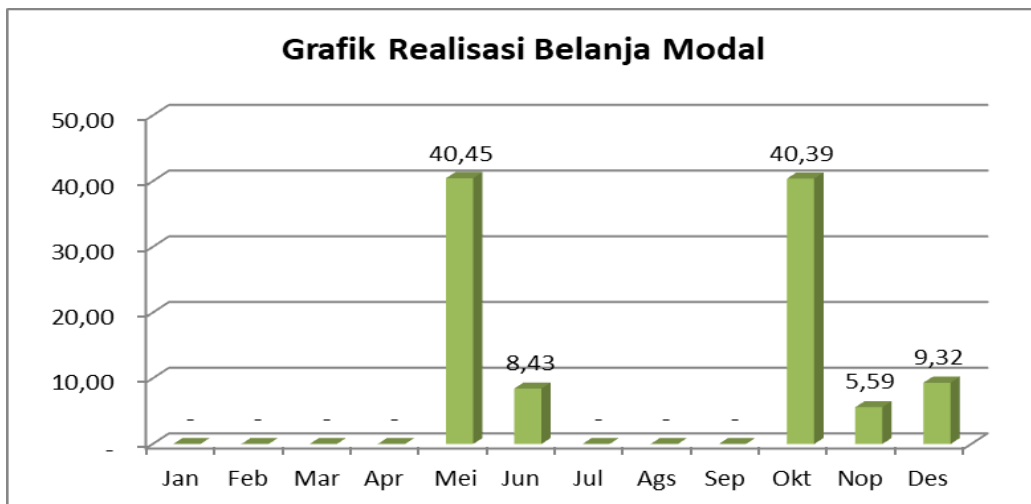
Gambar: 4.2. Grafik Realisasi Belanja Barang

c) Belanja Modal

Untuk program Sarana dan Prasarana Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mendapat alokasi dana sebesar Rp491.500.000,- berupa pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi berupa personal computer (PC) untuk menunjang kegiatan kepaniteraan, Meubelair berupa lemari arsip kepaniteraan, mesin antrian sidang, AC Split, UPS dan Access Door.

Tabel 4.3. Realisasi Belanja Modal

NO.	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	KET (%)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	491.500.000,-	489.318.598,-	2.181.402,-	99,56%



Gambar: 4.3. Grafik Realisasi Belanja Modal

Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA-005.05.2.690202/2021 Tanggal 12 November 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun Anggaran 2021.

Untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mendapat alokasi dana sebesar Rp37.800.000,- dengan capaian penyerapan anggaran sebagai berikut:

Tabel 4.4 Realisasi Belanja Barang Operasional Kepaniteraan

NO.	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	KET (%)
1	Belanja Barang Ops. Kepaniteraan	37.800.000,-	29.930.000,-	7.870.000,-	79,18%

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Tanah, Gedung dan Kendaraan

a. Keadaan Sarana dan Prasarana Tanah, Gedung dan Kendaraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menempati tanah dan bangunan sendiri dimana status kepemilikan sudah atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI.

1) Tanah dan Bangunan Gedung

Tabel 4.5. Keadaan Sarana dan Prasarana Tanah dan Gedung

No.	Satker	Luas Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)	Peruntukan	Pemegang Hak Atas Tanah
1	PTUN Serang	4.242 m2	1.572 m2	Gedung Kantor	Pemerintah RI Cq. MA RI

2) Rumah Negara

Tabel 4.6. Keadaan Sarana dan Prasarana Rumah Negara

No.	Satker	Jumlah	Kondisi			Pemegang Hak Atas Tanah
			Baik	Rusak	Rusak Berat	
1	PTUN Serang		N I H I L			

3) Kendaraan Dinas Roda 2

Tabel 4.7. Keadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Roda 2

No.	Merk	Type	Jumlah	Kondisi
1	Honda	E1F02N 12M2 A/T	1 Unit	Baik
2	Honda	GL PRO III	1 Unit	Rusak

4) Kendaraan Dinas Roda 4

Tabel 4.8. Keadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Roda 4

No.	Merk	Type	Jumlah	Kondisi
1	Toyota	New Avanza Veloz 1.5 M/T	1 Unit	Baik
2	Toyota	Corolla Altis 1.8J M/T	1 Unit	Baik
3	Toyota	New Vios 1.5G M/T	1 Unit	Baik
4	Toyota	Kijang Innova G 2.0 M/T	1 Unit	Baik

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung

Tabel 4.9. Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

No.	Jenis Pemeliharaan	Ket. Pelaksanaan
1	Pemeliharaan Jaringan Telepon	Maret
2	Perbaikan Railing Tangga	Maret
3	Perbaikan Pintu Lobi Depan dan Belakang	Mei
4	Pemeliharaan Keramik Lantai	Juni
5	Pemeliharaan Taman Belakang Kantor	Juni
6	Pengecatan Dinding Dalam Gedung	Juni
7	Pengecatan Dinding Luar Gedung	Juli
8	Perbaikan Pedestrian Area Lapangan	Juli

9	Pemeliharaan Plafond	Agustus, September
10	Perbaikan Toilet dan Lobby Belakang	September
11	Pembersihan Toilet	September
12	Pengecatan Dinding Ruang Hakim	September
13	Perbaikan Pintu dan Toilet	Oktober
14	Pengecatan Area Luar Kantor	Nopember
15	Pengecatan Waterproofing Atap Gedung	Nopember
16	Pengecatan Meja PTSP	Nopember

c. Penambahan Sarana dan Prasarana Gedung

Tabel 4.10. Penambahan/Hibah Sarana dan Prasarana Gedung

No.	Tanggal	Jenis Barang	Ket
1	31-12-2021	Gedung Musholla	Register Hibah

d. Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung

Tabel 4.11. Kegiatan Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung

No.	Tanggal	Jenis Barang	Ket
1		N I H I L	

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Hal-hal yang dapat menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas Pengadilan antara lain adanya sarana dan prasarana fasilitas penunjang. Dalam hal ini sarana dan prasarana fasilitas gedung pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Keadaan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Tabel 4.12.Keadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

No.	Nama Barang	Jumlah	Tahun Pengadaan	Keterangan
1	Personal Computer	11	2012 – 2021	1 Unit Rusak
2	Laptop	19	2012 – 2019	1 Unit Rusak
3	Infocus	1	2015	Rusak
4	PABX	1	2014	Baik
5	AC	31	2014 - 2021	Baik
6	Faximile	2	2014	1 Unit Rusak
7	CCTV	25	2016-2021	1 Unit Tidak Aktif
8	Sound system	1	2014	Baik
9	Mesin Absensi	2	2014	Baik
10	Tabung Pemadam Api Ringan	1	2018	Baik
11	Genset	1	2014	Baik
12	Camera Web	1	2014	Baik
13	Monitor Informasi	12	2014 – 2019	Baik
14	Brankas	1	2012	Baik
15	Mesin Antrian Sidang	1	2021	Baik

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Tabel 4.13. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

No.	Jenis Pemeliharaan	Ket. Pelaksanaan
1	Servis Scanner (3 Unit)	Februari
2	Servis Laptop (12 Unit)	Februari
3	Servis PC Unit	Maret
4	Pemeliharaan Genset	Maret
5	Perbaikan Kendaraan Dinas Roda 4	April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, Nopember
6	Perbaikan Kendaraan Dinas Roda 2	-

7	Perbaikan CCTV	Mei
8	Perbaikan AC Split & Kaset	Juli, Agustus, Oktober
9	Perbaikan Printer	Februari
10	Perbaikan Meubelair	-
11	Perbaikan Infocus	-
12	Servis Monitor TV	Juni
13	Perbaikan jaringan internet	September

c. Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Tabel. 4.14. Kegiatan Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

No.	Tanggal	Jenis Barang	Ket
		N I H I L	

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung administrasi perkara berbasis elektronik khususnya pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan E-Court dukungan Teknologi Informasi mutlak dibutuhkan. Pembenahan dan peningkatan teknologi informasi merupakan salah satu prioritas demi terwujudnya keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi Pengadilan yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu yang hal tersebut selaras dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi.

Sebagai penunjang utama terhadap kelancaran dan kemudahan pelayanan publik, sampai dengan tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menerima/melaksanakan pengadaan berupa perangkat-perangkat keras yang memadai seperti personal computer, laptop, printer dan terus mengadakan pengkinian serta sinkronisasi data secara berkala dengan Mahkamah Agung RI.

Keadaan perangkat teknologi informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15. Keadaan Perangkat Teknologi Informasi

Satker	Keadaan Teknologi Informasi dan Pendukungnya								
	Internet	Server	PC	Laptop	Printer	Access Point	Router	Switch Hub	Layar Informasi
PTUN Serang	100 Mbps	3	31	19	14	19	1	2	10



Gambar 4.4. Server PTUN Serang

1. Implementasi e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Serang

E-Court merupakan instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat, secara garis besar proses e-Court dimulai pendaftaran perkara secara online (*e-filing*), pembayaran panjar perkara elektronik (*e-payment*), pengiriman dokumen secara online, pemanggilan secara online (*e-summons*), persidangan secara elektronik (*e-litigation*) dan penyampaian putusan secara online.



Gambar 4.5 e-Court Corner



Gambar 4.6. Mesin informasi e-Court

Dalam implementasinya untuk tahun 2021 Perkara yang terdaftar melalui e-Court pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16. Jumlah Perkara Terdaftar Melalui E-Court

Tahun	Perkara Sisa dan Masuk	Putus	Sisa Perkara
2021	114	94	20



Gambar: 4.7. Mesin Antrian Sidang

2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Serang

Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan wujud integrasi teknologi informasi dengan ragam regulasi di bidang administrasi perkara. Sampai dengan akhir tahun 2021 aplikasi SIPP yang digunakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menggunakan SIPP Versi 4.0.1.

Aplikasi SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terkoneksi dengan SIPP Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sehingga informasi Perkara dapat diakses para pihak pencari keadilan cukup melalui SIPP baik itu proses pada tingkat pertama maupun banding. Disamping itu, putusan yang *upload* ke SIPP secara otomatis juga *upload* ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

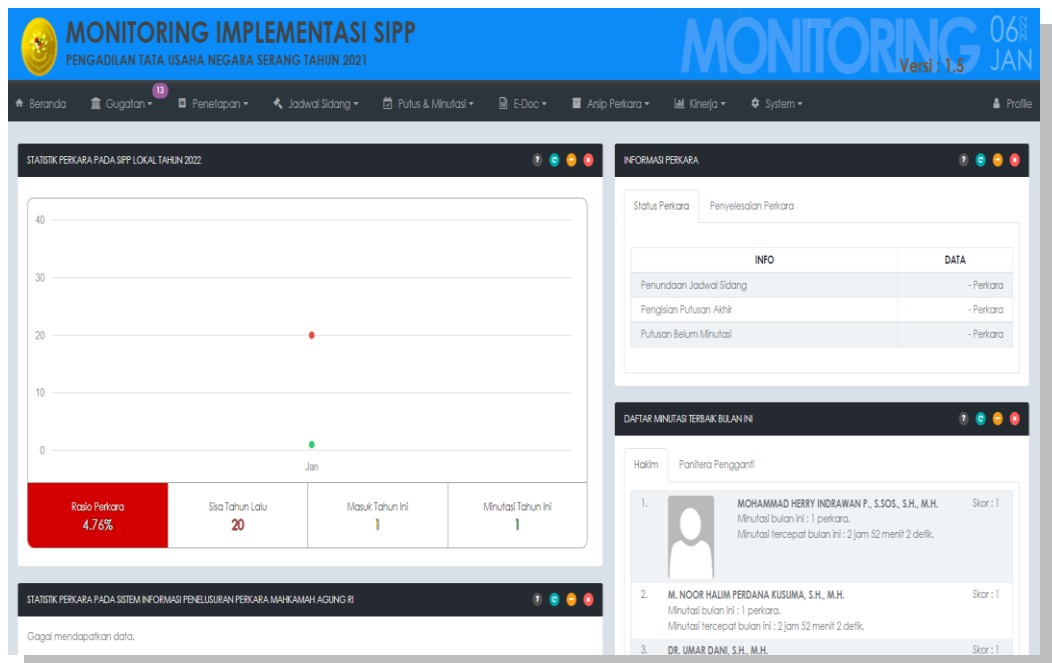
Secara rutin database SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dilakukan sinkronisasi, baik ke tingkat banding maupun ke Mahkamah Agung RI. Alamat SIPP Web pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17. Alamat SIPP Web Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Satker	Alamat SIPP
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	http://192.168.51.2/SIPP32



Gambar 4.7. Tampak Muka Aplikasi SIPP PTUN Serang



Gambar: 4.8. Tampak Muka Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP PTUN Serang

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Program Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang diterapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistematis dan berkelanjutan. Program akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan peforma, kinerja dan pelayanan publik yang prima.

Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini terus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem, kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan.

Dasar pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor: 1142/DJMT.3/B/9/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Pelaksanaan Akreditasi Tahun Anggaran 2017.

Akreditasi penjaminan mutu yang berprinsip inovatif, terstruktur, sistematis dan berkelanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah melaksanakan akreditasi penjaminan mutu pada tahun 2020 dan memperoleh hasil penilaian A (Excellent) hasil tersebut mengulangi/mempertahankan penilaian yang telah diperoleh sebelumnya pada tahun 2018, dengan kriteria penilaian yang digunakan meliputi 7 (tujuh) area yaitu: 1) Manajemen Kepemimpinan dan Sumber Daya Manusia, 2) Pola Bindalmin dan SOP Penyelesaian Perkara,

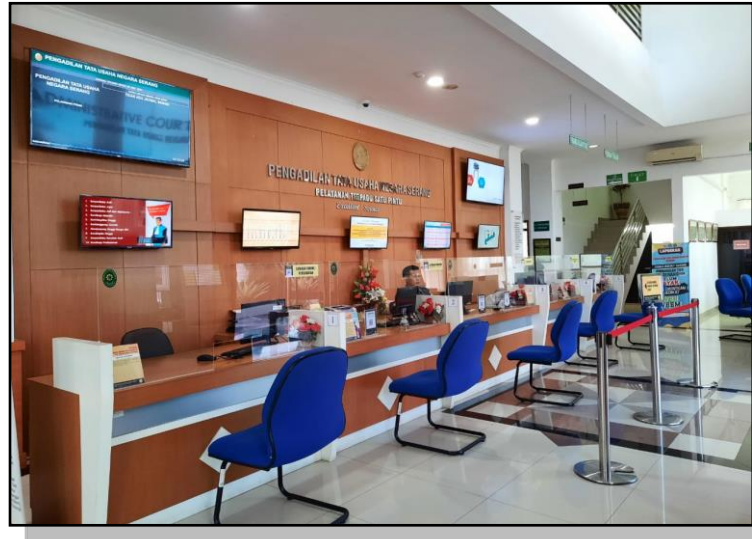
3) Sarana dan Prasarana Pengadilan, 4) E-Judicary, 5) Layanan Pengadilan, 6) PNBPN dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara, 7) Survei Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat.



Gambar 5.1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu

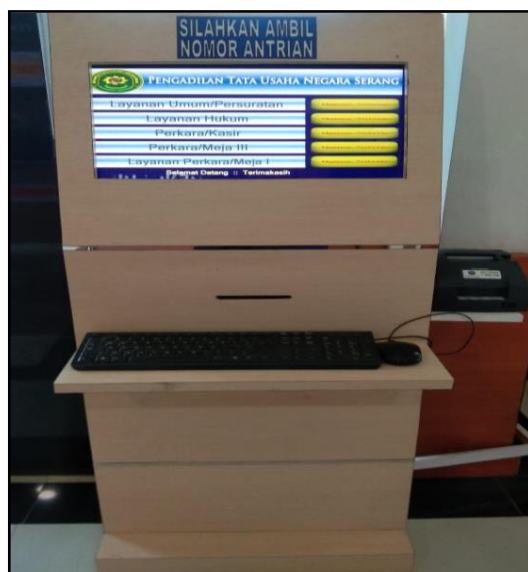
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Pelayanan Publik di setiap Instansi terus ditingkatkan dan dipermudah, saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Melalui PTSP ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal permohonan sampai akhir/diterbitkannya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat.



Gambar 5.2. Meja PTSP PTUN Serang

PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinatif, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku.



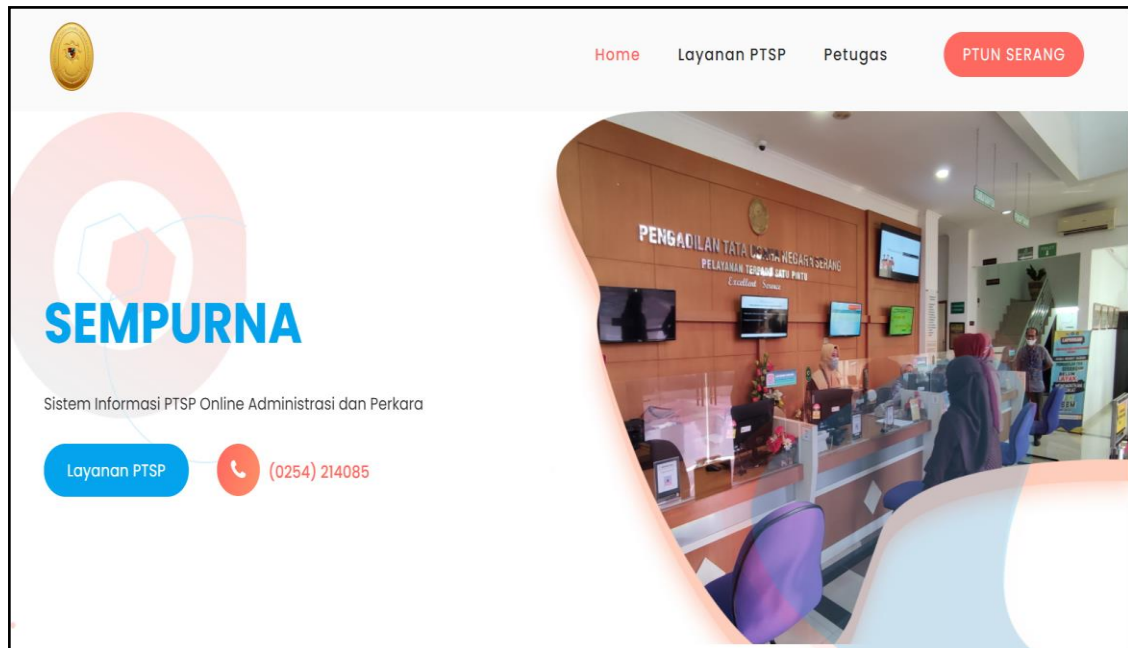
Gambar 5.3. Mesin Nomor Antrian Pengunjung

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk: 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai standar yang telah ditetapkan, 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap para pihak yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 5.1. Jumlah Permohonan Layanan PTSP Tahun 2021

No.	Jenis Layanan	Jumlah Permohonan Layanan	Ket
1	Layanan Umum/Persuratan	- 993 Surat Masuk - 2058 Surat Keluar	-
2	Layanan Hukum	- 9 Permohonan Informasi - 392 Pendaftaran Surat Kuasa	-
3	Layanan Perkara/Meja I	- 84 Gugatan - 5 Permohonan	-
4	Layanan Perkara/Meja III	- 39 Banding - 32 Kasasi - 10 Peninjauan Kembali - 2 Eksekusi	-
5	Layanan Perkara/Kasir	- 177 PNBP Biaya Perkara - 333 PNBP Salinan Putusan - 175 Pengembalian Sisa Panjar	-

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2021 mengembangkan PTSP secara online, hal tersebut untuk lebih memudahkan para pencari keadilan yang memerlukan informasi dapat terlayani tanpa harus mendatangi kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

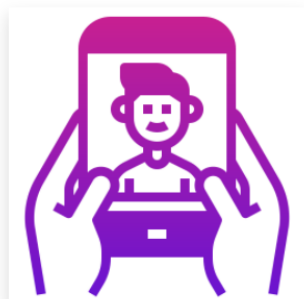


Gambar 5.4. Tampak muka aplikasi PTSP Online

Adapun fitur-fitur PTSP secara online yang dapat diakses oleh para pencari keadilan adalah sebagai berikut:

- Layanan informasi melalui sambungan telepon/*voice call* (0254) 214085

LAYANAN PTSP ONLINE



Voice Call

Layanan Informasi Melalui Telepon.

(0254) 214085

Gambar 5.5. Layanan Voice Call PTSP Online

- Layanan informasi melalui *video call* melalui Zoom.



Gambar 5.6. Layanan Video Call PTSP Online

- Layanan Informasi melalui Online Chat



Gambar 5.7. Layanan Online Chat PTSP Online

C. Inovasi Pelayanan Publik

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berupaya menciptakan aplikasi layanan pendukung dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 dan juga aplikasi-aplikasi lain yang merupakan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

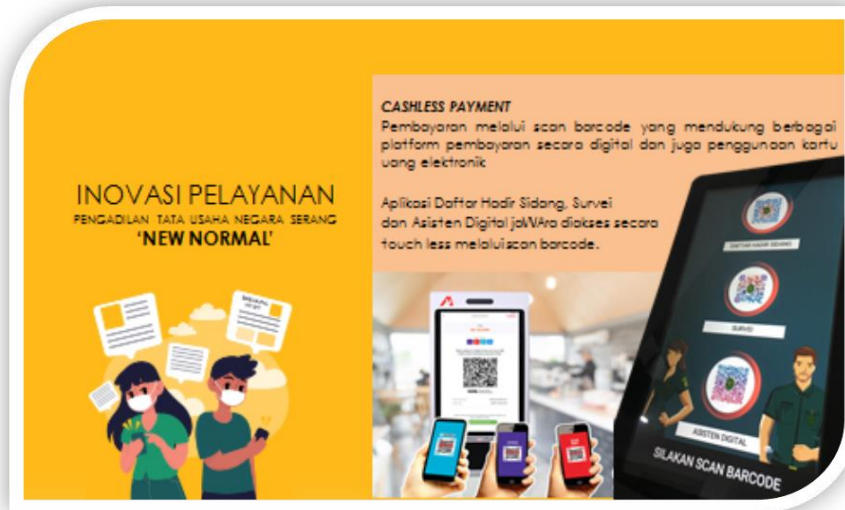
Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan telah diterapkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yaitu :

No	Uraian	Keterangan
1	#jaWAra# Asisten Digital PTUN Serang	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi pencarian data Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berbasis Bot WhatsApp adalah program atau perangkat lunak chatbot yang dapat digunakan secara khusus dalam aplikasi perpesanan terenkripsi WhatsApp populer, baik yang dapat diakses oleh publik ataupun keperluan internal. - Bertujuan membantu masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan data informasi perkara secara lebih cepat serta meningkatkan kecepatan pelayanan publik dan keterbukaan terkait pelayanan pengadilan.



Gambar: 5.8. Aplikasi Asisten Digital jaWAra

- | | |
|---|--|
| <p>2 Survei Indeks Persepsi Korupsi & Persepsi Kualitas Pelayanan Elektronik</p> <p>3 Daftar Buku Tamu Elektronik</p> <p>4 Daftar Hadir Persidangan Elektronik 'e-Attendance</p> <p>5 Service Rating Elektronik</p> | <p>Dalam rangka pencegahan Covid-19, pelayanan PTSP menerapkan mekanisme "TOUCH LESS" dengan menscan QR Code untuk mengakses layanan yang tersedia</p> |
|---|--|



Gambar: 5.9. Aplikasi Inovasi Akses Layanan *Touchless*

- | | |
|------------------|---|
| <p>6 SIMKARA</p> | <p>Sistem aplikasi berbasis Web untuk Informasi Kehadiran Para Pihak Berperkara dalam Persidangan</p> |
|------------------|---|



Gambar: 5.10. Tampak muka aplikasi SIMKARA

7 SIMPATI

Sistem aplikasi berbasis Web untuk informasi dan manajemen pelayanan upaya administratif



Gambar: 5.11. Tampak muka aplikasi SIMPATI

8 EMPATI

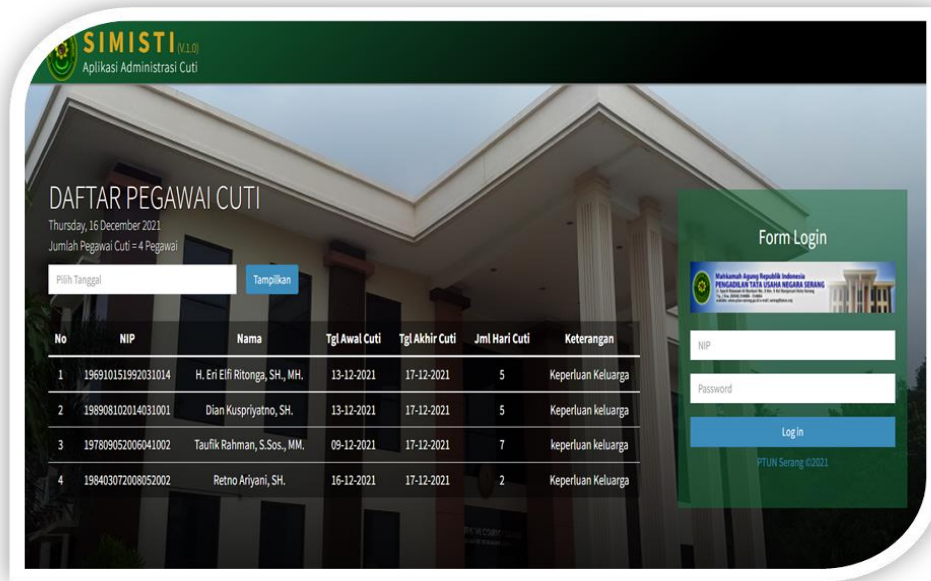
Sistem aplikasi berbasis Web untuk Eksekusi Mandiri Badan/Pejabat Pemerintahan dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Administrasi



Gambar: 5.12. Tampak muka aplikasi EMPATI

9 SIMISTI

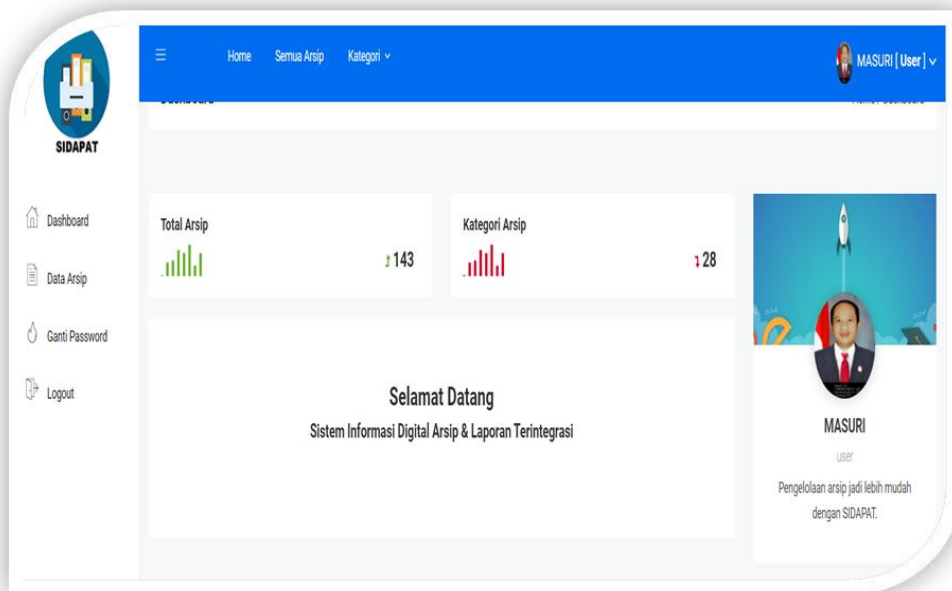
Aplikasi berbasis Web untuk administrasi pelayanan cuti pegawai



Gambar: 5.13. Tampak muka aplikasi SIMISTI

10 SIDAPAT

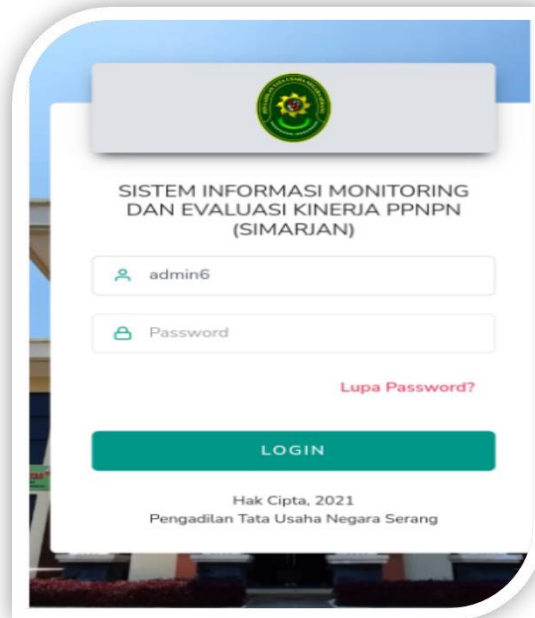
Sistem aplikasi bank data berbasis Web untuk unggah Arsip Digital dan Laporan secara mandiri dari tiap unit kerja.



Gambar: 5.14. Modul User aplikasi SIDAPAT

11 SIMARJAN

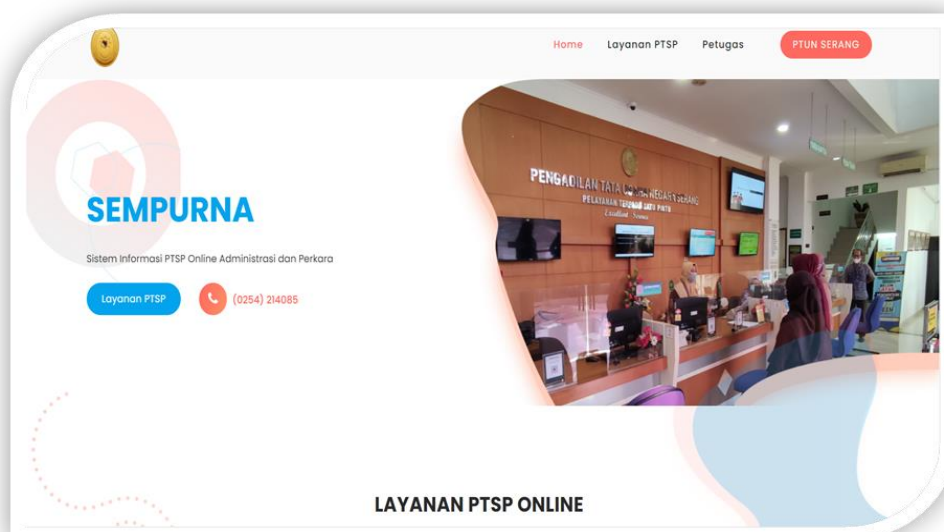
Aplikasi berbasis Web merupakan sistem monitoring dan evaluasi kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).



Gambar 5.15. Menu Login Aplikasi SIMARJAN

12 SEMPURNA

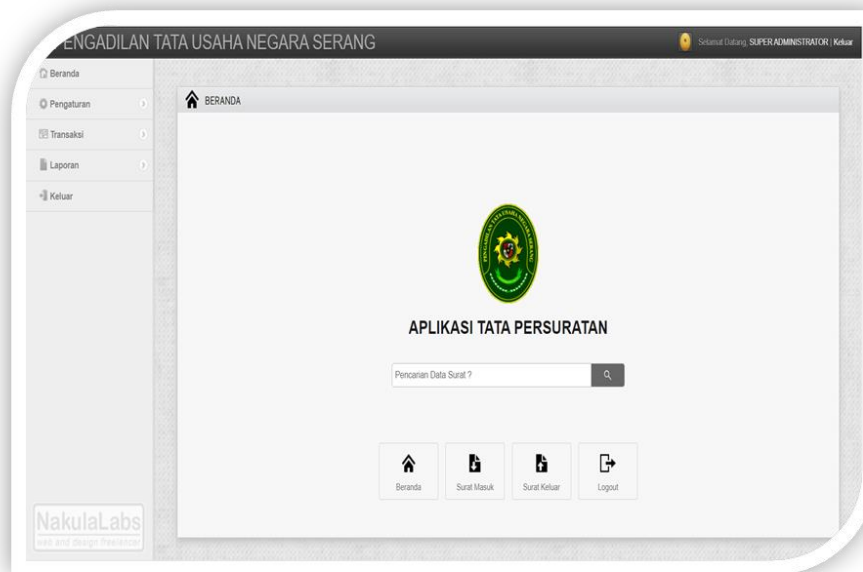
Adalah layanan komunikasi dengan petugas PTSP melalui beragam channel komunikasi (PTSP Online).



Gambar: 5.16. Tampak muka aplikasi PTSP Online (SEMPURNA)

13 E-SURAT

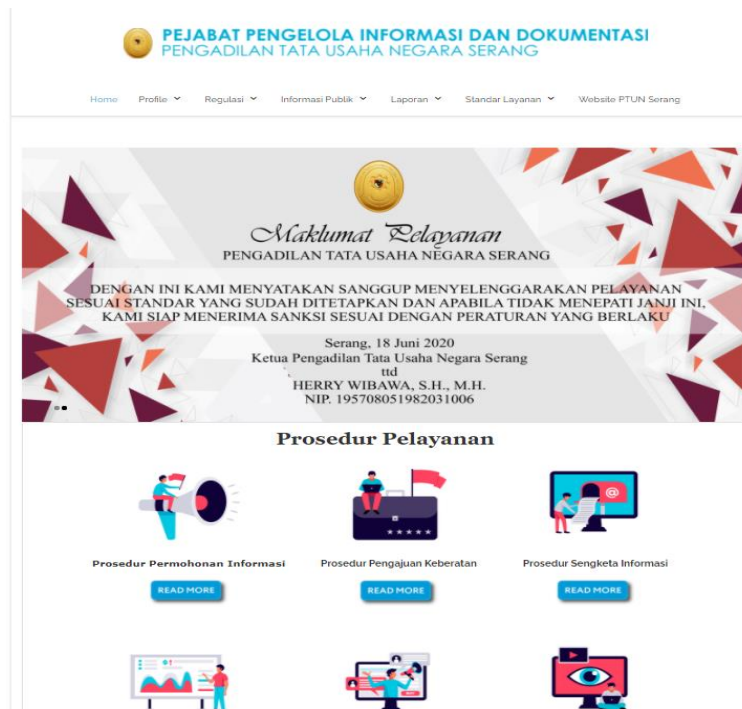
Merupakan aplikasi sistem Tata Persuratan secara elektronik.



Gambar: 5.17. Tampak muka aplikasi tata persuratan PTUN Serang

14 PPID PTUNSRG

Sistem Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang dikelola sebagai dokumen informasi yang dimiliki oleh badan publik.



Gambar: 5.18. Maklumat Pelayanan pada aplikasi PPID PTUN Serang

D. Kegiatan Layanan Lainnya

1. Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selalu berkomitmen untuk mendorong pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan peradilan. Secara umum program ini telah mendorong perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, menjamin eksistensi birokrasi yang anti korupsi, birokrasi yang berkualitas serta birokrasi yang memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan publik dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Pada tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas praktek korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi.

Menyempurnakan capaian pembangunan Zona Integritas yang telah dibangun, pada tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menggenapinya dengan raihan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).



Gambar: 5.19. Sertifikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

2. Penganugerahan Sebagai Badan Publik Informatif

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN dan/atau APBD), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan wajib disediakan, diberikan, dan/atau diterbitkan oleh badan publik kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Di tengah kondisi menghadapi pandemi sebagai badan publik Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tetap berkomitmen untuk mengimplementasikan secara sungguh-sungguh UU KIP dalam penyelenggaraan *core businessnya* dan dengan komitmen dan dukungan dari semua lini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berhasil meraih kualifikasi badan publik informatif tahun 2021 pada Monitoring dan Evaluasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten tahun 2021. Hal ini memperbaiki capaian pada tahun sebelumnya yakni 2020 dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Serang masih menjadi badan publik menuju informatif.

Keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meraih kualifikasi badan publik informatif pada tahun 2021 untuk kategori Lembaga Non Struktural/Vertikal dapat dijadikan tolak ukur bahwa lembaga Peradilan semakin terbuka pada aspek penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagai wujud pemenuhan dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Peringkat terbaik ke III untuk Pengadilan Tingkat Pertama dalam Penilaian Website oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Uaha Negara.



Gambar: 5.22. Sertifikat Penghargaan Terbaik ke III Pengadilan Tk. Pertama Dalam Penilaian Website

5. Salah satu Satker Pengadilan Tingkat Pertama terbanyak meraih peringkat terbaik dalam Pelatihan tahun 2020 – 2021 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Mahkamah Agung RI.



Gambar: 5.23. Champion Meeting 2020 – 2021 untuk Pengadilan Tingkat Pertama Terbanyak Meraih Peringkat Terbaik Pelatihan Pusediklat Menpim MA

BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

1. Pengawasan dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku baik berupa peraturan perundang-undangan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan sebagainya antara lain :
 - a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/II/1994 dan Juklak tentang Tata Cara Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan.
 - b. Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 1 Agustus 1994 Nomor : MA/Kumdil/207/VIII/K/1994.
 - c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 1993 tanggal 11 Mei 1993 tentang Pembinaan Personil dan Kepemimpinan Pengadilan.
 - d. Surat Ketua MARI Nomor: MA/KUMDIL/207/VIII/K/1994 tanggal 1 Agustus 1994 yang menginstruksikan penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang (di Pengadilan Tingkat Banding) dan penunjukan Hakim Pengawas Bidang (di Pengadilan Tingkat Pertama).
 - e. Keputusan Ketua MARI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan tanggal 24 Agustus 2006.
 - f. Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
 - g. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : W2-TUN7/102/PS.00/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagaimana telah diadakan perubahan surat Nomor: W2-TUN7/315/PS.00/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021;

2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menunjuk Hakim senior sebagai koordinator Hakim-Hakim Pengawas Bidang.
3. Penunjukan Hakim Pengawas bagi Sub Kepaniteraan Perkara, Sub Kepaniteraan Hukum, Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala, serta Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan,
4. Pengawasan secara berkala berupa permintaan laporan bulanan ataupun triwulan kepada masing-masing Sub Bagian, Hakim dan Panitera Pengganti.
5. Pengawasan pokok sesuai ketentuan yang ada terhadap bidang masing-masing (Waskat oleh pejabat yang bersangkutan lebih diaktifkan) yaitu oleh Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Tabel 6.1. Daftar Nama Hakim Pengawas Bidang Tahun 2021

No.	NAMA / NIP	JABATAN	PENGAWAS BIDANG
1	NELVY CHRISTIN, S.H.,M.H. NIP. 19761204 20012 2 002	WAKIL KETUA	Koordinator Pengawas Bidang
2	Dr. UMAR DANI S.H., M.H. NIP. 19790429 200502 1 002	HAKIM	Pengawas Bidang Kepaniteraan Perkara (Administrasi Perkara & Persidangan)
3	YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H. NIP. 198610182009042004	HAKIM	Pengawas Bidang Kepaniteraan Perkara (Administrasi Keuangan Perkara)
4	JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H.M.H. NIP.19801225 200805 1 001	HAKIM	Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum
5	FEBRINA PERMADI, S.H. NIP. 198502182009122005	HAKIM	Pengawas Bidang Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
6	LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum. NIP.197702172003122001	HAKIM	Pengawas Bidang Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
7	JULIAH SARAGIH, S.H., M.H. NIP. 19701103 199603 2 001	HAKIM	Pengawas Bidang Sub Bagian Umum dan Keuangan (Administrasi Keuangan)
8.	RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H. NIP. 19831122 200604 2 001	HAKIM	Pengawas Bidang Sub Bagian Umum dan Keuangan (Administrasi Umum)

B. Evaluasi

Dalam setiap lembaga pemerintah yang transparan maka harus selalu diadakan evaluasi secara internal, baik di bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan. Pelaksanaan tugas administrasi umum secara garis besar sudah berjalan baik dan tertib meskipun masih terdapat kekurangan.

Terhadap kinerja pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam melayani para pencari keadilan dilakukan evaluasi dalam bentuk rapat-rapat yang dilaksanakan setiap bulan.

BAB VII

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman dan kebijakan maupun program kerja yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun tugas administrasi perkara dan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sudah berjalan dengan baik dan tertib namun secara rutin pembinaan dan pengawasan tetap dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

Dari uraian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 sebagaimana disampaikan di depan dapat memberikan gambaran secara umum tentang keadaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, antara lain:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;
2. Percepatan penyelesaian perkara telah dilaksanakan secara maksimal meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis;
3. Pembinaan dan pengawasan internal telah ditunjuk dan di SK-kan Hakim Pengawas Bidang serta telah dijalankan dengan baik dan terus menerus dikembangkan sehingga lebih efektif dan obyektif;
4. Pelaksanaan anggaran dan administrasinya telah dilaksanakan dengan baik dan tertib sesuai dengan besarnya pagu anggaran yang ditetapkan dalam DIPA satuan kerja dan dilakukan evaluasi secara berkala sehingga diharapkan prosentase realisasi setiap tahun meningkat;
5. Kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan serta menunjang kompetensi sumber daya manusia bagi hakim dan pegawai masih sangat diperlukan. Hal ini untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan bagi masyarakat dimana diperlukan tenaga kerja yang profesional;

6. Prestasi yang telah dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam hal memberikan pelayanan prima dibuktikan dengan meraih Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Predikat A “Excelent” dua kali berturut-turut;
7. Meraih Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pembangunan Zona Integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
8. Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik telah diupayakan secara baik didukung dengan inovasi-inovasi pelayanan publik yang telah dikembangkan dan diterapkan sehingga atas hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diganjar sebagai badan publik informatif oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.

B. REKOMENDASI

1. Perlu adanya penambahan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang antara lain: Ruang Sidang, Ruang Rapat, Ruang Hakim, Ruang Panitera Pengganti, Ruang Arsip Perkara maupun Kesekretariatan untuk Kendaraan Dinas, Meubelair serta Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi..
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang belum memiliki Aula/Ruang Serbaguna yang dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan yang bersifat seremonial, karena selama ini masih memanfaatkan ruang sidang jika disaat yang bersamaan ada jadwal sidang maka pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi terganggu.
3. Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Serang belum memiliki Rumah Dinas, hal tersebut menjadi kesulitan tersendiri bagi Satker ketika pergantian pimpinan yang seyogyanya pimpinan yang baru hanya cukup membawa koper saja akan tetapi hal yang terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pimpinan yang baru akan direpotkan dengan mencari tempat tinggal sewa untuk ditempati sebagai rumah dinas.

4. Perlu tambahan anggaran untuk pembangunan pagar dan penataan area parkir tamu/pengunjung oleh karena jika pelebaran jalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten dirampungkan maka area parkir untuk tamu/pengunjung akan tergusur, dan lahan parkir akan dialihkan ke tanah sebelah kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai pengganti atas lahan yang tergusur untuk pelebaran jalan Provinsi Banten.
5. Perlu penambahan tenaga pegawai untuk pekerjaan yang memerlukan teknis tertentu antara lain: teknisi jaringan, arsiparis, pustakawan, analis perencanaan, analis pelaporan, pranata sarana dan prasarana.